LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

DISPERMADES PPKB
KABUPATEN BANJARNEGARA

TAHUN 2023

DISPERMADES PPKB KABUPATEN BANJARNEGARA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'la, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-NYA, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemeintah Tahun 2023 dapat diselesaikan. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik atas amanat dan tanggungjawab kepada Dispermades PPKB.

Tahun anggaran 2023 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Tahun 2023-2026 dalam mendukung capaian RPD masa transisi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026. Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 disusun dengan mempedomani RPJP Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025. Dispermades PPKB mendukung tiga dari total 7 tujuan dalam RPD yaitu (1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, (2) Meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar yang berkualitas serta (3) Meningkatnya kualitas layanan publik.

Laporan kinerja menyajikan informasi atas pelaksanaan kinerja yang terdiri dari sasaran strategis, program, kegiatan dan anggaran sebagaimana tertuang dalam Renstra dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Dispermades PPKB juga berperan aktif dalam program dan kebijakan nasional diantaranya berkaitan dengan Dana Desa, Pendampingan BUMDes MA transformasi eks - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM - MP) serta Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana Perpres 72 Tahun 2021.

Penghargaan dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh seluruh pihak yang telah mendukung tugas dan fungsi Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh jajaran Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara yang telah menunjukkan dedikasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggungjawabnya. Semoga Allah SWT, senantiasa meridhoi usaha kita bersama.

Banjarnegara, 31 Januari 2024

KEPALA DISPERMADES PPKB
KABUPATEN BANJARNEGARA

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA DISPERMADES PPKB

HENDRO CAHYONO, SE, MSi.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681130 199703 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR vi

BAB I. PENDAHULUAN 1
A. Gambaran Umum 1
1. Latar Belakang 1
2. Landasan Hukum 2
3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara 3
4. Struktur Organisasi 4
5. Keadaan Internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara 6
B. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi 9
C. Sistematika LKjIP 11

BAB II. PERJANJIAN KINERJA 12
A. Perencanaan Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Banjarnegara 12
1. Visi 12
2. Misi 14
B. Perjanjian Kinerja 16

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 22
A. Capaian Kinerja Organisasi 23
Sasaran 1. Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan Perangkat Daerah 24
Sasaran 2. Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa 28
Sasaran 3. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 43
Sasaran 4. Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat 67
B. Realisasi Anggaran 73
C. Capaian Kinerja Lainnya 81

BAB IV. PENUTUP 82

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Dispermades PPKB Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2023 6

Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Dispermades PPKB Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023 7

Tabel 1.3 Komposisi Pegawai Dispermades PPKB Berdasarkan Golongan Tahun 2023 8

Tabel 2.1 Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 17

Tabel 2.2 Penetapan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Banjarnegara Tahun 2023 18

Tabel 2.3 Rincian Anggaran Per Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendlaian Penduduk dan Keluaga Berencana Tahun 2023 18

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja 22

Tabel 3.2 Pencapaian Indikator Sasaran Strategis Tahun 2023 23

Tabel 3.3 Capaian Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah 24

Tabel 3.4 nilai SAKIP Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 per komponen 25

Tabel 3.5 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 25

Tabel 3.6 Nilai SAKIP Perangkat Daerah dibandingkan Target Jangka Menengah ... 26

Tabel 3.7 Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Sasaran Strategis Ke-1 27

Tabel 3.8 Capaian Indikator Indikator Program Sasaran Strategis Ke-1 28

Tabel 3.9 Capaian Indikator Jumlah Desa Berstatus Mandiri 29

Tabel 3.10 Rekapitulasi Status Kemajuan dan Kemandirian Desa di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018-2023 30

Tabel 3.11 Nilai IDM Desa Mandiri Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 31

Tabel 3.12 Sebaran Desa Berdasarkan Status Kemajuan dan Kemandirian per Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 34

Tabel 3.13 Realisasi Indikator Jumlah Desa Berstatus Mandiri Tahun 2018-2023 34

Tabel 3.14 Realisasi Indikator Jumlah Desa Berstatus Mandiri dibandingkan Target Jangka Menengah 35

Tabel 3.15 Rekapitulasi Perkembangan Dana Desa Tahun 2019 - 2023 35

Tabel 3.16 Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Sasaran Strategis Ke-1 37

Tabel 3.17 Capaian Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan Sasaran Strategis Ke-1 38

Tabel 3.18 Capaian Indikator Angka Kelahiran Total (TFR) 44

Tabel 3.19 Angka Kelahiran Total (TFR) per Kecamatan Tahun 2023 45

Tabel 3.20 Realisasi Indikator Angka Kelahiran Total (TFR) Tahun 2019-2023 46

Tabel 3.21 Realisasi Indikator Angka Kelahiran Total (TFR) Perangkat Daerah dibandingkan Target Jangka Menengah 47

Tabel 3.22 Realisasi Indikator Angka Kelahiran Total (TFR) Kabupaten dibandingkan Target Nasional dan Target Provnsi Jawa Tengah Tahun 2023 47

Tabel 3.23 Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Sasaran Strategis Ke-3 49

Tabel 3.24 Indikator Program, Sasaran Strategis Ke-3 49

Tabel 3.25 Capaian Indikator Program yang Mendukung TFR Tahun 2019-2023 50

Tabel 3.26 Capaian Indikator Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) 59

Tabel 3.27 ASFR (usia 15-19) per Kecamatan Tahun 2023 60

Tabel 3.28 Realisasi Indikator Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Tahun 2019-2023 61

Tabel 3.29 Realisasi Indikator Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Perangkat Daerah dibandingkan Target Jangka Menengah 61

Tabel 3.30 Realisasi Indikator Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Kabupaten dibandingkan Target Nasional dan Target Provnsi Jawa Tengah Tahun 2023 62

Tabel 3.31 Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Sasaran Strategis Ke-3, Indikator ASFR Remaja Usia 15-19 Tahun 63

Tabel 3.32 Capaian Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan Sasaran Strategis Ke-3 64

Tabel 3.33 Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan 68

Tabel 3.34 Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat 68

Tabel 3.35 Nilai Masing-masing Unsur Pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat 69

Tabel 3.36 Realisasi Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2019-2023 69

Tabel 3.37 Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Sasaran Strategis Ke-4, Indikator Indeks Kepuasan masyarakat 70

Tabel 3.38 Capaian Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan Sasaran Strategis Ke-4 71

Tabel 3.39 Rincian Program dan Kegiatan, Pagu serta Realisasi Penyerapan Anggaran Dispermades PPKB Tahun 2023 74

Tabel 3.40 Rekapitulasi Penghitungan Konsistensi Penyerapan Anggaran Dispermades PPKBTahun 2023 79

Tabel 3.41 Perkembangan Pagu Anggaran dengan Realisasi Anggaran Tahun 2019-2023 79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 .1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Banjarnegara... 5

Gambar 1 .2 Komposisi Pegawai Dispermades PPKB Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023 6

Gambar 1 .3 Komposisi Pegawai Dispermades PPKB Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2023 6

Gambar 1 .4 Komposisi Pegawai Dispermades PPKB Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023 7

Gambar 1 .5 Komposisi Pegawai Dispermades PPKB Berdasarkan Golongan Tahun 2023 8

Gambar 3.1 Realisasi Indikator Nilai SAKIP Dispermades PPKB Tahun 2019-2023 26

Gambar 3.2 Realisasi Indikator Jumlah Desa Berstatus Mandiri Tahun 2019-2023 . 35

Gambar 3.3 Besaran Dana Desa Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2023 36

Gambar 3.4 Angka Kelahiran Total (TFR) per Kecamatan Tahun 2023 45

Gambar 3.5 Realisasi Indikator Angka Kelahiran Total (TFR) Tahun 2019-2023 46

Gambar 3.6 ASFR (Usia 15-19) per Kecamatan Tahun 2023 60

Gambar 3.7 Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Tahun 2019 - 2023 61

Gambar 3.8 Realisasi Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2019-2023 69

Gambar 3.9 Perbandingan Penyerapan Anggaran Tahun 2019-2023 79

BAB I. PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Laporan kinerja sebagaimana dimaksud, berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD. Laporan Kinerja dihasilkan dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diselenggarakan oleh masing-masing Entitas Pelaporan dan atau Entitas Akuntansi.

Berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan *(disclosure)* secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan Kinerja disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati. Tujuan pelaporan kinerja sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dispermades PPKB) Kabupaten Banjarnegara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Bajarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Laporan Kinerja Dispermades PPKB Tahun 2023 disusun berdasakan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Dispermades PPKB merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Kinerja Dispermades PPKB Tahun 2023 merupakan gambaran pencapaian sasaran ataupun tujuan, sebagai penjabaran visi dan misi, arah kebijakan dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan program dan kebijakan yang ditetapkan. Kinerja Dispermades PPKB bisa dilihat melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), realisasi anggaran maupun capaian kinerja lainnya.

2. Landasan Hukum

a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
b. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
c. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
f. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

i. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 36).

3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara.

Dispermades PPKB mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas, Dispermades PPKB menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang pemerintahan desa, kelembagaan dan perencanaan partisipatif, pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna, pengembangan kawasan perdesaan dan tata ruang perdesaan, pengendalian penduduk dan advokasi, serta keluarga berencana;
b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pemerintahan desa, kelembagaan dan perencanaan partisipatif, pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna, pengembangan kawasan perdesaan dan tata ruang perdesaan, pengendalian penduduk dan advokasi, serta keluarga berencana;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan desa, kelembagaan dan perencanaan partisipatif, pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan

teknologi tepat guna, pengembangan kawasan perdesaan dan tata ruang perdesaan, pengendalian penduduk dan advokasi, serta keluarga berencana;

d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang pemerintahan desa, kelembagaan dan perencanaan partisipatif, pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna, pengembangan kawasan perdesaan dan tata ruang perdesaan, pengendalian penduduk dan advokasi, serta keluarga berencana;
e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan desa, kelembagaan dan perencanaan partisipatif, pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna, pengembangan kawasan perdesaan dan tata ruang perdesaan, pengendalian penduduk dan advokasi, serta keluarga berencana;
f. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
g. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Struktur Organisasi

Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara merupakan dinas Tipe A yang dipimpin oleh Kepala Setingkat Eselon II, dibantu oleh Sekretaris dan 5 (lima) Kepala Bidang (Eselon III) dan 14 (empat belas) Kepala Seksi dan Sub Bagian (Eselon IV) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022. Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANJARNEGARA

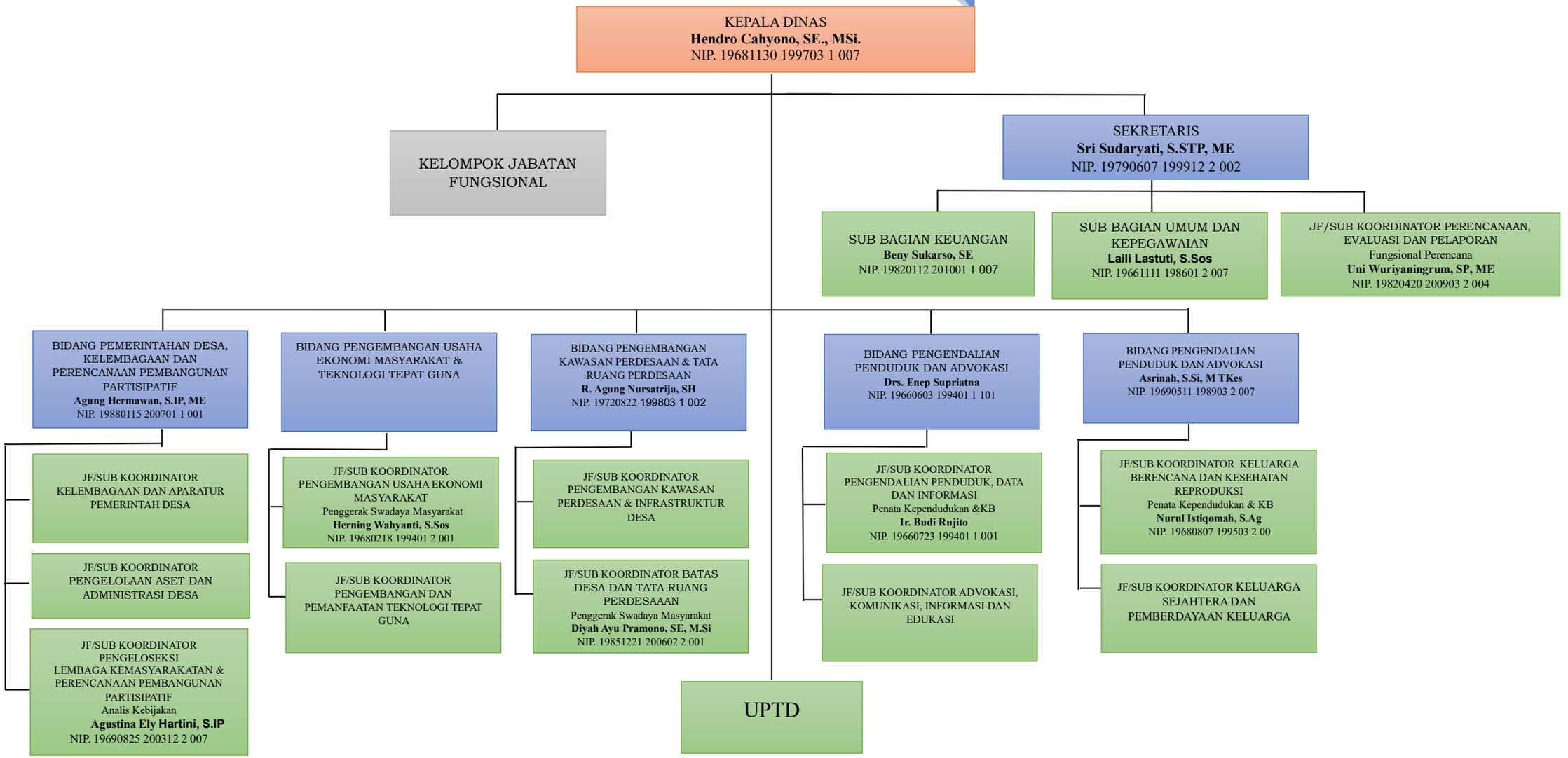

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara

5. Keadaan Internal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana

Dispermades PPKB memiliki sumberdaya manusia sebanyak 58 orang yang terdiri dari 29 laki-laki dan 29 perempuan. Tahun 2023 Dispermades PPKB mendapatkan tambahan tenaga ASN melalui formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 8 orang.

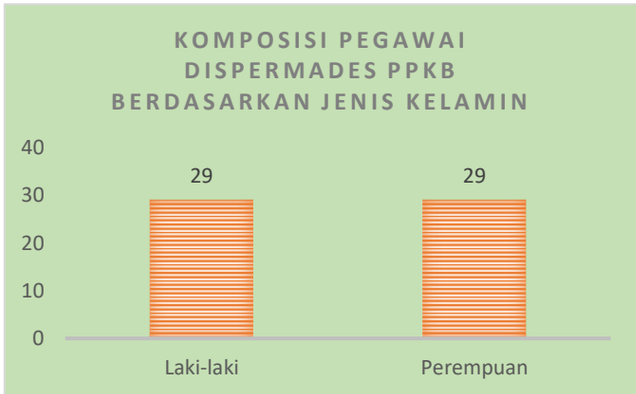

Gambar 1.2. Komposisi Pegawai Dispermades PPKB Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023

a. Komposisi Pegawai DISPERMADES PPKB menurut status kepegawaian

Komposisi sumberdaya manusia (pegawai) yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan status kepegawaian sebagai berikut :

Tabel 1. 1. Komposisi Pegawai Dispermades PPKB Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2023

No	Status Kepegawaian	Jumlah		Total
		L	P	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	PNS	17	13	30
2.	PPPK	3	5	8
3.	THL	9	11	20
	Jumlah	**29**	**29**	**58**

Sumber : Data Kepegawaian Dispermades PPKB, 2023

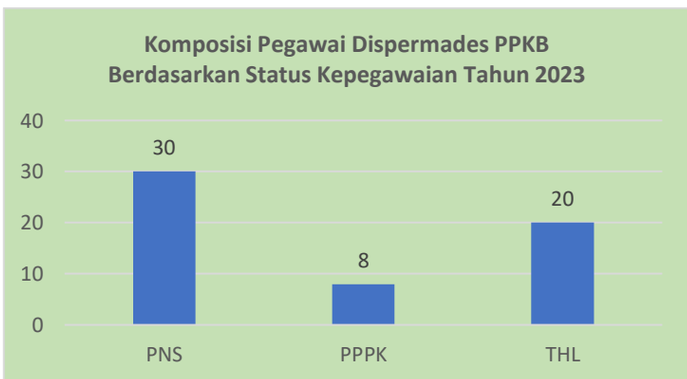

Gambar 1.3. Komposisi Pegawai Dispermades PPKB Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2023

Komposisi pegawai yang ada pada DISPERMADES PPKB tahun 2023 berdasarkan status kepegawaian jumlah terbesar yaitu PNS masih sebesar 30 orang, kemudian disusul PPPK sebanyak 8 orang dan THL sebanyak 20. Jumlah PNS turun dibandingkan tahun sebelumnya karena memasuki masa pensiun serta mutasi kepegawaian.

b. Komposisi Pegawai DISPERMADES PPKB menurut tingkat pendidikan

Komposisi sumberdaya manusia (pegawai) yang ada pada Dispermades PPKB berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 1. 2. Komposisi Pegawai Dispermades PPKB Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7
1	SD Sederajat	0	0	0	0	0
2	SMP Sederajat	2	0	0	0	2
3	SMA Sederajat	8	1	8	4	21
4	D3	0	1	0	2	3
5	S1	5	7	4	10	26
6	S2	2	4	0	0	6
	Jumlah	**17**	**13**	**12**	**16**	**58**

Sumber : Data Kepegawaian Dispermades PPKB, 2023

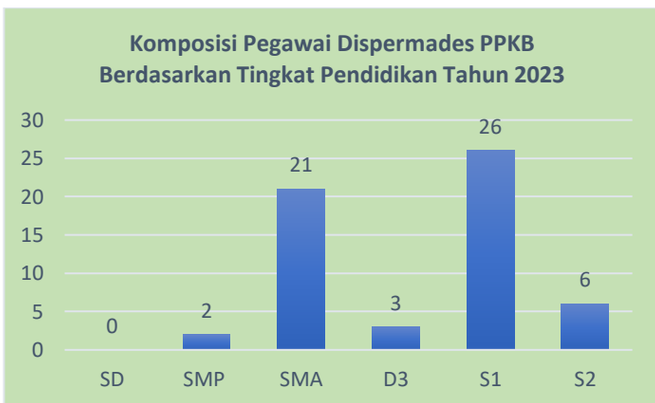

Gambar 1.4. Komposisi Pegawai Dispermades PPKB Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

Berdasarkan data di atas, komposisi pegawai yang ada di Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara tahun 2023 berdasarkan pendidikan jumlah terbanyak yaitu pendidikan S1 sebanyak 26 orang, disusul SMA sebanyak 21, S: 2 sebanyak 6 orang. Komposisi ini lebih baik dari tahun sebelumnya, karena tahun 2022 paling banyak yaitu Pendidikan S1. Beberapa pegawai yang berpendidikan SMA sudah menempuh Pendidikan S1. Tingkat pendidikan merupakan salah satu unsur berpengaruh terhadap indeks profesionalisme ASN dan pangkat/jabatan dalam mekanisme jabatan fungsional tertentu (JFT)

c. Komposisi Pegawai DISPERMADES PPKB menurut pangkat dan golongan ruang

Komposisi pegawai berdasarkan golongan di DISPERMADES PPKB Tahun 2023 pada Tabel 1.3 dibawah ini :

Tabel 1. 3. Komposisi Pegawai Dispermades PPKB Berdasarkan Golongan Tahun 2023

No	Pangkat	Golongan	L	P	Jumlah
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1	-	1
2	Pembina Tk. I	IV/b	-	1	1
3	Pembina	IV/a	2	3	5
4	Penata Tk. I	III/d	3	3	6
5	Penata	III/c	-	1	1
6	Penata Muda Tk.I	III/b	-	3	3
7	Penata Muda	III/a	3	1	4
8	Pengatur Tingkat I	II/d	5	1	6
9	Pengatur	II/c	1	-	1
10	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	2	-	2
11	Pengatur Muda	II/a	-	-	-
12	Juru Tk.I	I/d	-	-	-
13	Juru	I/c	-	-	-
14	PTT	-	3	5	8
15	THL	-	9	11	20
	Jumlah		**29**	**29**	**58**

Sumber : Data Kepegawaian Dispermades PPKB, 2023

Gambar 1.5. Komposisi Pegawai Dispermades PPKB Berdasarkan Golongan Tahun 2023

Berdasarkan data di atas, pegawai berdasarkan golongan di DISPERMADES PPKB, jumlah terbanyak yaitu THL. Sedangkan untuk PNS jumlah terbanyak pada golongan III sebanyak 14 orang, kemudian disusul golongan IV sebanyak 7 orang dan golongan II sebanyak 9 orang. Jumlah masing-masing golongan menurun dari tahun sebelumnya karena memasuki masa purna tugas dan mutasi. Golongan ruang pegawai berkaitan dengan masa kerja serta jengjang pendidikan.

B. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah pinggiran dan desa, merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional Wilayah perdesaan dianggap sebagai wilayah yang tertinggal, miskin, dan pembangunannya lambat karena jauh dari pusat pemerintahan padahal sebenarnya wilayah pedesaan memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah hanya saja belum dimanfaatkan dengan maksimal.

Strategi pembangunan perdesaan seyogyanya diarahkan untuk mengatasi problem kemiskinan dan ketimpangan yang semakin tinggi. Seluruh potensi yang ada harus menjadi penopang gerakan desa membangun. Pemerintah menyalurkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang jumlahnya semakin meningkat, desa membutuhkan terus-menerus pasokan pengetahuan agar mampu mengoptimalisasi kewenangan yang telah diberikan sesuai UU Desa guna mewujudkan desa yang mandiri. Ekonomi Desa ke depan harus menjejak kuat pada basis potensi ekonomi desa yang didayagunakan disertai dengan akses dan kepemilikan masyarakat desa atas alat-alat produksi si ekonomi yang ada di desa.

Sejalan dengan misi haluan kebijakan pembangunan perdesaan yang transformatif, organisasi ekonomi berperan penting dalam memikul beban untuk menggerakkan aktivitas ekonomi desa yang memiliki semangat kolektivitas, pemerataan, dan solidaritas sosial. Organisasi ekonomi itu dapat berupa BUM Desa, BUM Desa bersama, koperasi, lembaga keuangan mikro, UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), atau usaha bersama lainnya. Tidak kalah pentingnya organisasi ekonomi ini haruslah memiliki kecakapan dalam menjalankan usaha serta mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan kemanfaatan secara sosial.

Pemerintah melalu PP Nomor 11 Tahun 2021 mendorong Desa untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu wadah mengelola usaha, memanfaatkan aset, pengembangan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan dan atau jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Pengembangan ekonomi di kawasan perdesaan melalui BUMDesa/BUMDesa Bersama diharapkan menunjang pertumbuhan ekonomi dan masyarakat perdesaan dan kemandirian desa.

Seiring dengan meluasnya kewenangan Desa, tuntutan serta tanggung jawab desa pun semakin besar. Perangkat desa memerlukan kapasitas yang memadai untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Apalagi memasuki enam tahun pelaksanaan UU Desa, dimana semakin banyak misi dan harapan yang ditumpukan kepada desa, kemampuan dan kapasitas perangkat desa yang sesuai dengan amanat perundangan perlu terealisasi.

Selain Pembangunan desa, pembangunan secara menyeluruh termasuk pula didalamnya meningkatkan kualitas hidup manusia berkaitan dengan masalah kependudukan. Bahwa penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan

harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan karena jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. (UU No. 52 Tahun 2009).

Penyelenggaraan keluarga berencana telah memberikan dampak positif pada tren penurunan Fertilitas dan memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas penduduk. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, melalui peningkatan usia harapan hidup dan penurunan angka kematian ibu dan anak, merupakan penanda bahwa terjadi peningkatan kualitas penduduk. Peningkatan kualitas penduduk dan derajat kesehatan masyarakat disisi lain memiliki tantangan yang berkaitan dengan isu strategis stunting. OPD KB memiliki peran aktif melalui Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, dimana OPD KB ditunjuk sebagai Sekretaris Percepatan penurunan Stunting.

Salah satu komitmen Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam membangun desa dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banjarnegara tahun 2023-2026 pada tujuan kelima dalam yaitu Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu Pemerintah juga berkomitmen melalui Pembangunan kependudukan melalui tujuan ketujuh yaitu Meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar yang berkualitas. Tujuan tersebut menjadi dasar Dispermades PPKB selaku perangkat daerah yang mengampu urusan pemberdayaan Masyarakat dan desa serta urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mendampingi, menfasilitasi dan membina penyelenggaran desa dan Masyarakat desa serta melaksanakan Pembangunan kependudukan dan keluarga berencana sesuai dengan kewenangannya.

Setelah mereviu kembali faktor-faktor dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari : gambaran pelayanan perangkat daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi, implikasi RTRW bagi pelayanan perangkat daerah, dan implikasi KLHS bagi pelayanan perangkat daerah. Setelah dianalisis terhadap permasalahan sebagaimana tersebut diatas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Masih rendahnya jiwa kemandirian desa dalam partisipasi pembangunan di Kabupaten Banjarnegara;
2. Kurangnya pemahaman dari desa akan pentingnya kerjasama antar desa;
3. Masih banyak desa yang dalam penetapan APBDes nya belum tepat waktu.

4. Rendahnya kualitas pasar desa, sebagai salah satu simpul ekonomi;
5. Belum semua desa memiliki lembaga ekonomi masyarakat / BUMDes;
6. Belum ada data valid terkait keberadaan lembaga ekonomi/usaha ekonomi masyarakat;
7. Belum ada data lengkap terkait kreativitas dan inovasi teknologi tepat guna;
8. Masih minimnya kemampuan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dengan jumlah anggaran yang besar baik dari pemeritah pusat, provinsi maupun kabupaten;
9. Masih kurangnya pemahaman aparatur desa tentang tupoksi lembaga kemasyarakatan dan desa, serta belum adanya data yang akurat terkait keberadaan lembaga kemasyarakatan dan desa;
10. Masih sedikitnya desa yang memiliki kepastian hukum tentang batas wilayah desa;
11. Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat desa;
12. Belum dipahaminya proses perencanaan pembangunan oleh aparat desa serta kelembagaan masyarakat dan desa;
13. Masih minimnya pengelolaan sistem informasi desa secara on-line.
14. Masih lemahnya koordinasi lintas sektoral;
15. Belum adanya regulasi penataan ruang kawasan perdesaan sebagai rujukan pembangunan kawasan perdesaan.
16. Masih rendahnya desa dengan strata maju/mandiri dan masih banyaknya desa dengan strata tertinggal/sangat tertinggal.

C. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKJIP

Sistematika penyusunan laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berecana Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN
- A. Gamabaran Umum
- B. Isu-Isu Strategis
- C. Sistematika Penyusunan LKJIP

BAB II. PERJANJIAN KINERJA
- A. Visi dan Misi Kepala Daerah
- B. Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2020

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
- A. Akuntabilitas Kinerja
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II. PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara.

Amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, di mana salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Bagi daerah yang mengalami masa transisi agar menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah periode 2023-2026. Nomenklatur dokumen dimaksud adalah Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. RPD Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang disusun secara teknokratis.

Periode kepemimpinan Bupati Banjarnegara sebelumnya berakhir pada tahun 2022, dengan masa kepemimpinan 2017-2022. Pemilihan kepala daerah berikutnya dilaksanakan pada pilkada serentak secara nasional tahun 2024. Dengan demikian, Kabupaten Banjarnegara termasuk daerah yang mengalami transisi sehingga nomenklatur dokumen perencanaan jangka menengah adalah Rencana Pembangun Daerah Tahun 2023-2026.

Rencana Strategis Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 merupakan salah satu penjabaran dari RPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026. Bahwa visi dan misi dalam RPD Tahun 2023-2026 mempedomani dokumen RPJP Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025. Tahun 2023 merupakan tahun pertama Dispermades PPKB atas pelaksanaan Renstra Tahun 2023-2026.

1. VISI

Sebagai bagian dari tahapan pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, visi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 mempedomani RPJPD Tahun 2005-2025. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Visi pembangunan dalam RPJPD Tahun 2005-2025 adalah:

BANJARNEGARA MAJU BERBASIS PERTANIAN

Visi Pembangunan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 ini mengarah pada pencapaian tujuan, cita-cita dan harapan masyarakat Kabupaten Banjarnegara. Visi pembangunan daerah tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, kesejahteraan, dan kelestarian yang ingin dicapai. Oleh karena

itu, perlu kiranya diberikan penjelasan makna visi untuk mendapatkan kesamaan persepsi tentang muatan substansi filosofis yang terkandung, sehingga segenap pemangku kepentingan secara sinergis dan optimal dapat memberikan kontribusi dalam rangka pencapaiannya.

Kabupaten Banjarnegara diartikan sebagai suatu daerah otonom. Daerah otonom (selanjutnya disebut daerah) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah menunjukkan suatu kesatuan pemerintahan dan kemasyarakatan beserta semua potensi yang dimiliki.

Maju artinya bahwa pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik secara fisik maupun nonfisik didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi, berperadaban tinggi, profesional serta berwawasan ke depan yang luas. Maju juga diarahkan pada terbentuknya daerah yang mampu mengelola segenap potensinya namun tetap mengedepankan pentingnya kerja sama dan sinergitas. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi maju adalah tercapainya daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat; terbangunnya jaringan sarana dan prasarana pembangunan, pemerintahan dan pelayanan yang merata yang berdampak pada berkurangnya kesenjangan antarwilayah, pembangunan perdesaan dan daerah terpencil; optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset daerah dan sumber-sumber keuangan lainnya bagi kepentingan pembangunan; dan meningkatnya investasi dalam pembangunan yang didukung kondusivitas daerah.

Berbasis artinya bahwa pembangunan daerah terkonsentrasi pada salah satu tujuan, sedangkan aspek-aspek yang lain tetap diperhatikan dan dilaksanakan untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut.

Pertanian, konsep pertanian dimaksudkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan daerah, pertanian merupakan konsentrasi selama periode RPJPD. Pertanian yang dimaksud adalah meliputi pertanian tanaman pangan seperti padi, palawija dan hortikultura yang meliputi sayur mayur dan buah-buahan. Di samping pertanian tanaman pangan juga bidang peternakan, perikanan dan perkebunan, yang kesemuanya diharapkan dapat memberikan kontribusi penuh dan besar yang dapat menopang pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

2. MISI

Misi merupakan pernyataan tentang rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025, terdapat penyederhanaan misi dalam RPJPD Tahun 2005-2025, sehingga misi menjadi sebagai berikut:

1. **Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai-nilai luhur agama dan budaya masyarakat** yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG), meningkatnya pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak, meningkatnya akses, pemerataan, dan mutu pelayanan kesehatan, meningkatnya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatnya pemenuhan hak-hak dasar bagi penduduk miskin, mantapnya kearifan lokal yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat, dan martabat manusia, dan menguatnya jati diri dan kepribadian masyarakat, meningkat dan menguatnya sumber daya manusia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bidang, meningkatnya karakter masyarakat yang berbudaya yang mendasarkan pada kearifan lokal dan jati diri, serta meningkatnya kesadaran dan pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari sehingga membentuk karakter masyarakat bermoral dan berakhlak mulia.
2. **Mewujudkan perekonomian rakyat yang maju dengan mengembangkan serta memperkuat perekonomian daerah melalui sektor pertanian yang berorientasi pada pasar dengan senantiasa menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan dalam pengelolaannya melalui regulasi yang tepat dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai** yang ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada akhir periode pembangunan jangka panjang mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan kabupaten-kabupaten yang maju di Indonesia, meningkatnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif (sektor pertanian, perdagangan, perindustrian, dan pariwisata didukung dengan sektor lain) yang berdaya saing tinggi menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi pertanian yang berkualitas, berdaya saing global,

menjadi motor penggerak perekonomian sekaligus mendorong peningkatan sumber-sumber pembiayaan pembangunan, disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan lebih bermutu, meningkatnya ketersediaan kebutuhan pokok dan dapat dipertahankan pada tingkat aman melalui swasembada pangan dan disertai dengan tersedianya instrumen jaminan pangan di masyarakat melalui revitalisasi pertanian dalam arti luas, meningkatnya sektor pertanian ke arah agribisnis dan agroindustri serta agrowisata yang didukung dengan meningkatnya perdagangan dalam usaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatnya pemanfaatan aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber kekayaan daerah, meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi dan seimbang, meningkatnya keterpeliharaan kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing, dan modal pembangunan daerah, meningkatnya kualitas sumber daya air, udara, dan tanah sesuai baku mutu dan terlindunginya kesehatan masyarakat dari dampak akibat pencemaran, meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta mengurangi dampak bencana alam, menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial, tercapainya penduduk tumbuh seimbang, serta berkurangnya tindak kekerasan berbasis gender dan anak tanpa diskriminasi, menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin, meningkatnya upaya perlindungan HAM dan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, meningkatnya kestabilan situasi dan kondisi perikehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakan HAM dan terwujudnya kesetaraan gender, meningkatnya keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat Kabupaten Banjarnegara, meningkatnya upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga dan memelihara persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat, serta meningkatnya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat dari segala tindak kejahatan.

3. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab** yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi dan kesadaran politik masyarakat terutama menyangkut hak dan kewajiban warga negara serta institusionalisasi partai politik dalam kegiatan politik, meningkatnya profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika, dan bertanggung jawab, serta mampu mendukung pembangunan daerah yang bebas

dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat, meningkatnya perkembangan sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, dan masyarakat yang mandiri, Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah, menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah, serta meningkatnya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.

4. Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar yang ditandai dengan meningkatnya infrastruktur wilayah dan yang andal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi daerah serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru, meningkatnya perumahan rakyat layak huni yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukungnya untuk mewujudkan daerah tanpa permukiman kumuh, meningkatnya keterpenuhan dan pemerataan kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah perdesaan dan perkotaan dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatnya jaringan irigasi, bendung dalam rangka menciptakan ketahanan pangan.

B. Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Tujuan strategis Dispermades PPKB dalam rangka mendukung pencapaian misi Kepala Daerah, yaitu pada misi sebagai berikut :

1. Misi 1. : **Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai-nilai luhur agama dan budaya Masyarakat;**
2. Misi 3. : **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab**

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan strategis jangka menengah, ditetapkan sasaran strategis dan indikator kinerja tahunan Dispermades PPKB sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2023-2026 dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2023. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan

penugasan dari kepala daerah kepada unit kerja dibawahnya untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator dan target kinerja. Melalui perjanjian kinerja akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dokumen Perjanjian Tahun Kinerja Tahun 2023 Kepala Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara mengalami satu kali penyesuaian yaitu pada anggaran perubahan Tahun 2023. Penyesuaian tersebut tidak berpengaruh terhadap target indikator namun hanya pada besaran alokasi anggaran untuk optimalisasi kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	
			Murni	Perubahan
1		*2*	*3*	*4*
1.	Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77	77
2.	Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah Desa Berstatus Mandiri	3	3
3.	Terkendalinya angka kelahiran total (TFR)	Angka kelahiran Total (TFR)	2,08	2,08
		Angka kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	22,36	22,36
4.	Meningkatnya kualitas layanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	83	83
	Anggaran (Rp)		28.530.509.895,00	24.878.171.906,00

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023 telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator. Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagaimana tertuang pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2. Penetapan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Banjarnegara Tahun 2023

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja		Target
1	2	3		4
1.	Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan Perangkat Daerah	1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77
2.	Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa	2.1	Jumlah Desa Berstatus Mandiri	3
3.	Terkendalinya angka kelahiran total (TFR)	3.1	Angka kelahiran Total (TFR)	2,08
		3.2	Angka kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	22,36
4.	Meningkatnya kualitas layanan masyarakat	4.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	83

Sumber : Perjanjian Kinerja Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara, 2023

Indikator kinerja Kepala Dinas Tahun 2023 tersebut kemudian diturunkan menjadi indikator kinerja pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara. Dengan adanya penjenjangan perjanjian kinerja ini diharapkan terdapat kesinambungan antara target kinerja kepala dengan pejabat dibawahnya.

Berdasarkan sumber dana, anggaran Dispermades PPKB TA 2023 terdiri dari APBD Kabupaten dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang KB. Anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten sebesar Rp12.864.634.906,00 dan DAK Sub Bidang KB sebesar Rp12.013.537.000. Anggaran Sub Bidang KB terbagi menjadi 1).DAK Non Fisik (BOKB) sebesar Rp10.955.336.000,00, 2).DAK Fisik Penugasan sebesar Rp1.058.201.000,00. Rincian anggaran Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara sebagai berikut :

Tabel 2.3 Rincian Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendlaian Penduduk dan Keluaga Berencana Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	*2*	*3*
A.	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**6.349.744.506,00**
1.	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**25.000.000,00**
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000,00
	2. Koordinasi dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00
2.	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.436.542.726,00**
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.334.152.726,00
	2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SPKD	102.390.000,00
3.	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**548.869.700,00**
	1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	*2*	*3*
	2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	533.869.500,00
4.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**152.900.000,00**
	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	152.900.000,00
5.	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**927.933.080,00**
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000,00
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	867.933.080,00
6.	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**258.499.600,00**
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Peeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	145.000.000,00
	2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dn Bangunan Lainnya	87.999.000,00
	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.500.000,00
B.	**Program Penataan Desa**	**103.827.000,00**
7.	**Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa**	**103.827.000,00**
	Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana Prasarana Desa	103.827.000,00
C.	**Program Peningkatan Kerjasama Desa**	**33.000.000,00**
8.	**Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa**	**33.000.000,00**
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	33.000.000,00
D.	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**4.712.040.000,00**
9.	**Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**4.712.040.000,00**
	1. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	5.000.000,00
	2. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	20.000.000,00
	3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	3.450.000.000,00
	4. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	350.000.000,00
	5. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	159.040.000,00
	6. Fasilitasi Pengangkatan dan Peberhentian Perangkat Desa	45.000.000,00
	7. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	5.000.000,00
	8. Pembinaan Peningkata Kapasitas Anggota BPD	70.000.000,00
	9. Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	120.000.000,00
	10. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	488.000.000,00
E.	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**	**1.316.355.000,00**
10.	**Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**1.316.355.000,00**
	1. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,	103.500.000,00

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	*2*	*3*
	RT, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
	2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaam Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	936.000.000,00
	3. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	25.000.000,00
	4. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Teknologi Tepat Guna	35.000.000,00
	5. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	216.855.000,00
F.	**Program Pengendalian Penduduk**	**419.800.000,00**
11.	**Kegiatan Pemaduan dan Sinkornisasi Kebijaka Pemrintahan Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**5.000.000,00**
	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	5.000.000,00
12.	**Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**414.800.000,00**
	1. Perumusan Parameter Kependudukan	5.000.000,00
	2. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	88.200.000,00
	3. Sub Kegiatan Pencatatan dan pengumpulan Data Keluarga	225.600.000,00
	4. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	96.000.000
G.	**Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**	**6.711.672.400,00**
13.	**Kegiatan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**1.262.015.000,00**
	1. Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	120.000.000,00
	2. Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	200.375.000,00
	3. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	260.000.000,00
	4. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KB	531.000.000,00
	5. Pengendalian Program KKBPK	80.000.000,00
14.	**Kegiatan Pendayagunaan Teaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**1.334.400.000,00**
	1. Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	342.000.000,00
	2. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	571.000.000,00
15.	**Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**3.183.757.400,00**
	1. Pengendalian Pendistribusian Aat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	47.700.000,00
	2. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangk panjang (MKJP)	2.310.889.400,00
	3. Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan KB	24.000.000,00

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	*2*	*3*
	4. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.058.210.000,00
	5. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Keshatan reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	51.700.000,00
	6. Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	20.000.000,00
16.	**Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daserah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**846.000.000,00**
	1. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	9.000.000,00
	2. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	837.000.000
H.	**Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**	**5.480.540.000,00**
17.	**Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**5.480.540.000,00**
	1. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	360.000.000,00
	2. Orientasi dan pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluraga/UPPKS)	50.000.000,00
	3. Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	30.000.000,00
	4. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4.939.200.000,00
	5. Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	38.400.000,00
	6. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	2.000.000,00
	7. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	37.940.000,00
	Jumlah	**24.878.171.906,00**

Sumber : Perjanjian Kinerja Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan melaiui laporan kinerja yang disusun secara periodik. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Dispermades PPKB menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang diukur dengan 5 (lima) indikator.

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Pengukuran data kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja. Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Rumus 1 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\textit{Persentase Pencapaian rencana Tingkat capaian} = \frac{Realisasi}{Rencana}\ x\ 100\%$$

2. Rumus 2 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\textit{Persentase Pencapaian rencana Tingkat} = \frac{Rencana-(Realisasi-Rencana)}{Rencana}\ x\ 100\%$$

Status capaian indikator ditetapkan berdasarkan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1. Skala Pengukuran Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Nilai Interval Konversi (NIK)
1	***2***	***3***
1.	91 ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76 ≤ 90%	Tinggi
3.	66 ≤ 75%	Sedang
4.	51 ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 65%	Sangat Rendah

Sumber : Permenpan 86 Tahun 2017

Realisasi sampai akhir tahun 2023 menunjukkan bahwa dari 5 indikator tersebut, rata-rata capaian kinerja tercapai dengan sangat tinggi (133,04%). Pagu Anggaran sebesar Rp24.878.171.906,00 dengan realisasi Rp23.501.345.543,00 atau 94,47 persen, sehingga terdapat efisiensi 5,53 persen. Capaian kinerja dianggap efisien apabila persentase realisasi output lebih besar dibandingkan dengan presentase realisasi anggaran.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berikut merupakan uraian pencapaian sasaran strategis dan program pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara.

Tabel 3.2. Pencapaian Indikator Sasaran Strategis Tahun 2023

Sasaran Strategis		Indikator Sasaran Strategis/Program		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Status Capaian
1		*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan Perangkat Daerah	1.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	77,00	73,45	95,39	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa	2.	Jumlah Desa berstatus mandiri	Desa	3	6	200	Sangat Tinggi
3.	Terkendalinya angka kelahiran total (TFR)	3.	Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka	2,08	1,65	120,67	Sangat Tinggi
		4.	Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Angka	22,36	11,52	148,48	Sangat Tinggi
4.	Meningkatnya kualitas layanan masyarakat	5.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	83	83,53	100.64	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian								133,04

Sumber : Pengukuran Kinerja DispermadesPPKB, 2023

Berdasarkan tabel di atas, terdapat lima indikator sasaran strategis, keseluruhan indikator tercapai dengan sangat baik. Untuk memastikan agar sasaran strategis tercapai, Dispermades PPKB telah mengidentifikasi resiko yang dapat menghambat pencapaian sasaran strategis. Beberapa resiko satsaran strategis antara lain :

1. Status perkembangan desa berdasarkan IDM tidak meningkat
2. Pendampingan desa tidak mencakup keseluruhan
3. Terdapat permasalahan/sengketa batas desa
4. Unit usaha BUMDes tidak sesuai dengan potensi Desa
5. Pernikahan usia muda
6. Persepsi negatif masyarakat akan Program KB
7. Keyakinan masyarakat untuk tidak ber KB
8. Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya keberlangsungan pelayanan KB

Untuk mengatasi resiko, Dispermades PPKB telah melakukan berbagai rencana aksi yang didukung program dan kegiatan diantaranya pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan desa termasuk pengembangan ekonomi Masyarakat desa serta kelembagaan desa, Pembangunan kependudukan, pembinaan keluarga berencana, serta pembangunan kesejahteraan keluarga.

Sasaran 1: Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan Perangkat Daerah

Pencapaian sasaran Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan daerah didukung oleh penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah yang baik dan terukur melalui sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja (Peraturan presiden No 29 Tahun 2014).

Berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Banjarnegara Nomor : 700/47/LHE/Insp/2023 tanggal 31 Juli 2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dispermades PPKB Tahun 2022, realisasi capaian nilai SAKIP sebagai berikut :

Tabel 3.3. Capaian Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Status Capaian
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan Perangkat Daerah	SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	77,00	73,45	95,39	Sangat Baik

Sumber Data : Laporan LHE SAKIP Nomor 700/47/LHE/Insp/2023

Berdasarkan tabel di atas, status pencapaian sangat baik (95,39%), meskipun belum memenuhi target kinerja. Nilai tersebut menupakan akumulasi dari 4 komponen penilaian yaitu (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi Internal). Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP, pencapaian terendah dari empat komponen yaitu Pelaporan Kinerja (72%) dan Evaluasi Kinerja (72%), Pengukuran Kinerja (73%), kemudian disusul Perencanaan Kinerja (75,33%). Rincian nilai SAKIP Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 per komponen sebagai berikut :

Tabel 3.4. Nilai SAKIP Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 per komponen

No	Komponen / Sub Komponen	Bobot Penilaian	Hasil Penilaian	Capaian (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Perencanaan Kinerja	30%	22,60	75,33%
2.	Pelaporan Kinerja	30%	21,60	72,00%
3.	Pengukuran Kinerja	15%	11,25	73,00%
4.	Evaluasi Kinerja	25%	18,00	72,00%
	Jumlah	100%	73,45	73,45%

Sumber Data : LHE SAKIP Nomor 700/47/LHE/Insp/2023

Kelemahan pada masing-masing komponen berdasarkan hasil evaluasi SAKIP yaitu :

a. **Perencanaan Kinerja** yaitu, dokumen perencanaan kinerja belum sepenuhnya sesuai dengan kinerja yang direncanakan, terdapat 1 sasaran dalam RKT yang tidak terdapat pada PK yaitu "menurunnya laju pertumbuhan penduduk".

b. **Pelaporan Kinerja** , yaitu (1) Belum terdapat meknisme pedoman teknis atas pengumpulan data kinerja dan (2) Data kinerja yang dikumpulkan secara berkala belum sepenuhnya relevan antara dokumen Rencana Aksi dengan dokumen Pengukuran Kinerja

Dari kelemahan di atas, rekomendasi untuk Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara sebagai berikut :

a. **Perencanaan Kinerja** yaitu, melakukan penyelarasan sasaran dalam perencanaan kinerja, antara dokumen RKT dan PK.

b. **Pelaporan Kinerja**

1) Menetapkan pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait Pedoman Teknis Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Kinerja;

2) Melakukan penyelarasan data kinerja pada dokumen Rencana Aksi dan dokumen Pengukuran Kinerja berkala.

c. **Evaluasi Kinerja**

Hal-hal pokok yang diperlukan dalam Evaluasi Akuntabilitas Internal yaitu dengan melaksanakan rekomendasi hasil evaluasi dengan melakukan upaya perbaikan tindaklanjut hasil evaluasi guna perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan. Realisasi Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.5. Realisasi Indikator Nilai SAKIP Dispermades PPKB Tahun 2019-2023

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan Perangkat Daerah	SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	60,12	74,05	76,28	77,42	73,45

Sumber Data : Laporan LHE SAKIP, 2019-2023

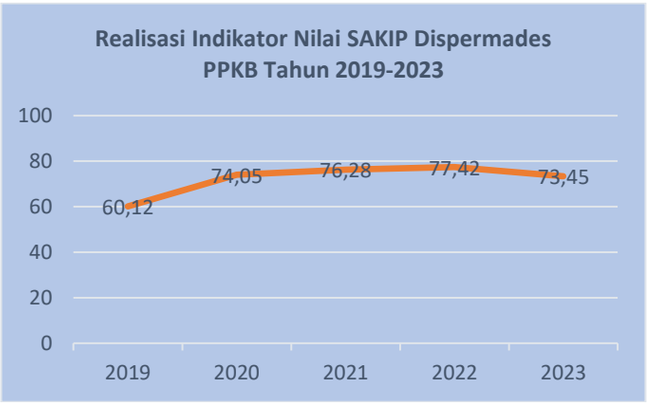

Gambar 3.1. Realisasi Indikator Nilai SAKIP Dispermades PPKB Tahun 2019-2023

Berdasarkan tabel di atas, nilai SAKIP cenderung naik dari tahun 2019 sampai dengan 2022, untuk kemudian menurun pada tahun 2023 sebesar 3,97 point. Terdapat perbedaan metode penilaian untuk periode 2019 s/d 2022 yaitu berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 12 Tahun 2015 dimana komponen penilaian meliputi 5 unsur (Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Pencapaian Kinerja). Sedangkan penilaian SAKIP tahun 2023 menggunakan Permenpan dan RB Nomor 88 Tahun 2021 dimana komponen penilaian meliputi 4 unsur yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi kelemahan yaitu adanya ketidakselarasan pada dokumen perencanaan terdapat 1 sasaran dalam RKT yang tidak terdapat pada PK yaitu "menurunnya laju pertumbuhan penduduk". Hal tersebut mengakibatkan menurunnya capaian nilai komponen perencanaan dibandingkan tahun 2022 dan berdampak pada menurunnya nilai SAKIP.

Tabel 3.6. Realisasi Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah dibandingkan Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Renstra	Realisasi	Capaian (%)	Status Capaian
1	***2***	***3***	***4***	***4***	***5***	***6***
Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan Perangkat Daerah	SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	78,00	73,45	93,57	Sangat Baik

Sumber Data : Pengukuran Dispermades PPKB Tahun 2023

Upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian sasaran :

1. Menyelaraskan dokumen perencanaan mulai dari perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan sampai dengan penyusunan dokumen anggaran serta pelaporan kinerja;
2. Pengumpulan data dan bahan capaian kinerja secara berkala dan lebih tepat waktu;

3. Melaksanakan evaluasi dan perbaikan dokumen akuntabilitas kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Melaksanakan pencermatan pada jadwal pelaksanaan kegiatan dengan rencana penggunaan anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan dan kebutuhan anggaran berjalan selaras;
5. Menyusun dokumen analisis manajemen resiko untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang bisa menghambat pencapaian tujuan dan sasaran.

Hambatan dan Tantangan dalam pencapaian sasaran :

1. Dalam penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran, terdapat peralihan / migrasi aplikasi keuangan dari SIMDA ke SIPD, sehingga memerlukan ketelitian dan pencermatan yang lebih agar proses entry bisa terlaksana dengan baik dan sesuai ketentuan;
2. Terdapat regulasi-regulasi baru yang berkaitan dengan implementasi perencanaan anggaran, sehingga perlu kecekatan dan gerak cepat agar proses penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran bisa berjalan selaras;
3. Pelaksanaan implementasi SAKIP belum berbasis aplikasi dan teknologi informasi.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya :

Pencapaian strategis didukung oleh sumberdaya manusia dan anggaran. Sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan program sebanyak 4 orang terdiri dari Golongan IV (S2 : 1 orang), Golongan III (S2 : 1 orang, S1 : 1 Orang), serta dibantu oleh 1 orang THL. Keseluruhan potensi sumber daya manusia tersebut telah melaksanakan tugas dengan optimal. Tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.7. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Sasaran Strategis Ke-1

Sasaran Strategis/ Indikator	Indikator			Anggaran (Rp)			Tingkat Efisiensi
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Sasaran : Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan Perangkat Daerah **Indikator** Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77,00	73,45	95,39	25.000.000	24.943.600	99,77	0,23

Sumber Data : Pengukuran Kinerja Dispermades PPKB Tahun 2023

Penggunaan sumberdaya untuk pencapaian indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan anggaran Rp25.000.000,00 serta realisasi Rp24.943.400,00 (98,79%). Pada dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran, pagu tersebut

terdapat pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terbagi dalam 2 sub kegiatan yaitu (1). Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan (2). Koordinasi dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Capaian indikator program dan kegiatan yang mendukung sebagai berikut :

Tabel 3.8. Capaian Indikator Program Sasaran Strategis Ke-1

No	Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
A.	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja.**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	17	17	100,00

Sumber Data : Pengukuran Kinerja Dispermades PPKB Tahun 2023

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan. Capaian Realisasi output sub kegiatan yang mendukung sasaran ke 1 sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan output Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sebanyak 12 Dokumen (Renstra, Renja, RKT, Rencana Aksi, RKO, RKA-P 2023, DPA-P 2023, RKA 2024, DPA 2024, Perjanjian Kinerja, Perjanjian Kinerja Perubahan, Pakta Integritas).
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan output Jumlah dokumen RKS-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD sebanytak 5 Dokumen (LKJiP, LKPJ-LPPD, POK Tahun 2023, Pengukuran Kinerja Tahun 2023, Evaluasi Kinerja Tahun 2023).

Sasaran 2 : Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa

Untuk mendukung pencapaian tujuan Kepala Daerah yaitu Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu ditunjang dengan meningkatnya kinerja pemerintahan desa. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, diukur dengan indikator Jumlah Desa berstatus mandiri. Indikator ini dipilih untuk mengetahui perkembangan tingkat kemandirian desa berdasarkan Indeks Desa Membangun.

Indeks Desa Membangun adalah suatu alat bantu yang digunakan untuk mengukur kemandirian suatu Desa melalui analisis dan nilai komposit seluruh

nilai skoring masing-masing indikator terpilih berdasarkan konsep kebijakan pembangunan yang ditetapkan serta otoritas kewenangan, tugas dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT).

Indeks Desa Membangun disusun untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri, sedangkan tujuan penyusunan Indeks Desa Membangun adalah untuk menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa serta menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa. Tiga pendekatan dalam melakukan penilaian keberhasilan program pembangunan desa atau yang disebut dengan indeks Desa Membangun (IDM) yaitu indeks ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi (lingkungan).

Penetapan status desa sebagaimana dimaksud yaitu berdasarkan Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa membangun (IDM). Berdasarkan data pemutakhiran Keputusan Kemendes PDTT Nomor 174 Tahun 2023 tanggal 14 Juli 2023 tentang Status Kemandirian dan Kemajuan Desa Tahun 2023, realisasi kinerja Jumlah Desa berstatus mandiri sebagai berikut :

Tabel 3.9. Capaian Indikator Jumlah Desa Berstatus Mandiri

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Status Capaian
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah Desa Berstatus Mandiri	Desa	3	6	200	Sangat Baik

Sumber Data : Keputusan Kemendes PDTT Nomor 174 Tahun 2023

Berdasarkan Tabel di atas, realisasi indikator sejumlah 6 desa melebihi dari target 3 desa dengan capaian 200 persen (sangat baik). Hal tersebut menunjukkan semakin banyak Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Desa-desa yang bertatus mandiri sebagai berikut :

1. Desa Mandiraja Kulon Kecamatan Mandiraja
2. Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa
3. Desa Pucang Kecamatan Bawang
4. Desa Madukara Kecamatan Madukara
5. Desa Wanadadi Kecamatan Wanadadi
6. Desa Penusupan Kecamatan Pejawaran

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu : Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Secara umum nilai indeks komposit di Kabupaten Banjarnegara tertinggi yaitu Indeks Ketahanan Sosial artinya memiliki kemampuan mengolah potensi sumber daya sosial secara baik, sedangkan indeks ketahanan ekonomi dan ekologi/lingkungan relative rendah. Indeks ekonomi rendah artinya belum bisa secara optimal memanfaatkan dan mengolah potensi ekonomi. Sedangkan indek ketahanan ekologi/lingkungan karena Sebagian besar wilayah di Kabupaten Banjarnegara rawan terjadi bencana sehingga membutuhkan kemampuan tanggap bencana yang lebih unggul. Rekapitulasi status kemajuan dan kemandirian desa di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2022 sebagai berikut :

Tabel 3.10. Rekapitulasi Status Kemajuan dan Kemandirian Desa di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018-2023

No	Status kemajuan dan kemandirian desa	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***
1	Mandiri	2	2	2	2	2	6
2	Maju	22	28	33	44	64	73
3	Berkembang	176	201	209	208	199	187
4	Tertinggal	64	35	22	13	1	0
5	Sangat Tertinggal	2	2	0	0	0	0
	Jumlah	266	266	266	266	266	266

Sumber Data : Keputusan Kemendes PDTT tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa, 2019-2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Kabupaten Banjarnegara di tahun 2020 mampu mengeliminasi desa sangat tertinggal, pada Tahun 2023 nihil mencatatkan status desa tertinggal. Selain itu tercatat bahwa status desa berkembang dari tahun 2016 (sejumlah 163 desa) sampai tahun 2020 (sejumlah 209 desa) selalu bertambah, dimana pertambahan angka tersebut disumbang dari peningkatan status desa tertinggal yang naik menjadi berkembang yakni dari 79 pada tahun 2016 menjadi 22 desa pada tahun 2020, sedangkan tahun 2021 sampai tahun 2023 mengalami penurunan jumlah status berkembang yaitu 208 pada 2021, menjadi 199 pada 2022 dan 187 desa pada tahun 2023, dikarenakan menyumbang kenaikan status menjadi desa maju dari jumlah 44 pada 2021, menjadi 64 pada tahun 2022, dan menjadi 73 desa pada tahun 2023.

Desa mandiri di Banjarnegara selama 6 (enam) tahun pelaksanaan Undang-Undang Desa yakni Tahun 2017 sampai 2022 berjumlah 2 (dua) yakni Desa Mandiraja Kulon Kecamatan Mandiraja dan Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa, hingga pencapaian pada Tahun 2023 mampu menambah 4 (empat) desa yang naik menjadi desa mandiri, yakni Desa Pucang Kecamatan Bawang, Desa

Madukara Kecamatan Madukara, Desa Penusupan Kecamatan Pejawaran, dan Desa Wanadadi Kecamatan Wanadadi. Adapun nilai Indeks Desa Mandiri dirinci per indikator dari keempat desa tersebut seperti terinci dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.11. Nilai IDM Desa Mandiri Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023

NO	DESA	2022				2023			
		IKS	IKE	IKL	IDM	IKS	IKE	IKL	IDM
1	Pucang	0,8571	0,85	0,6	0,7913	0,9314	0,85	0,6667	0,816
2	Madukara	0,84	0,8167	0,6	0,7522	0,8514	0,8167	0,8667	0,8449
3	Wanadadi	0,8914	0,95	0,6	0,8138	0,8971	0,95	0,6	0,8157
4	Penusupan	0,7657	0,8833	0,733	0,7914	0,8114	0,9167	0,8	0,8427

Sumber : Pemutakhiran IDM Kemendagri RI, 2022-2023

Dari 4 (empat) desa mandiri dengan nilai Indeks ketahanan sosial tertinggi di Tahun 2023 adalah Desa Pucang dengan nilai 0,9314 sedangkan desa dengan nilai terendah adalah Desa Penusupan dengan nilai 0,8114. Nilai Indeks Ketahanan Ekonomi rata-rata tidak mengalami perubahan terkecuali Desa Penusupan yang mengalami kenaikan yakni dari 0,8833 menjadi 0,9167, sedangkan untuk nilai Indikator Ketahanan Lingkungan yang mengalami kenaikan nilai secara signifikan adalah Desa Madukara dari 0,60 menjadi 0,8667 dan Desa Penusupan dari nilai 0,733 menjadi 0,9167. Adapun indikator yang mempengaruhi kenaikan nilai IDM pada keempat desa mandiri tersebut antara lain:

1. Desa Pucang Kecamatan Bawang

   Kenaikan terjadi pada nilai indikator ketahanan sosial, terdiri dari:

   a. Partisipasi kebiasaan gotong royong di desa, yang tercermin dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat maupun pembangunan selalu melibatkan swadaya gotong royong masyarakat;
   b. Ketersediaan fasilitas dan lapangan olahraga yang dapat diakses masyarakat secara mudah dan gratis;
   c. Terdapat kelompok kegiatan olahraga yang beragam seperti sepakbola, futsal, tenis meja dan basket;
   d. Terjalinnya kerukunan dan toleransi keragaman agama di Desa;
   e. Meningkatnya rasa aman penduduk yang dapat dilihat dari warga desa berpartisipasi aktif mengadakan siskamling, Tingkat kriminalitas yang terjadi di desa rendah serta rendahnya Tingkat konflik yang terjadi di desa;
   f. Terdapat sarana prasarana serta kemudahan akses baik jarak maupun waktu untuk menuju panti sosial untuk penyandang kesejahteraan sosial yakni Panti Pamardi Raharjo untuk penyandang kesejahteraan sosial;
   g. Waktu tempuh ke prasarana kesehatan cukup singkat tidak lebih dari 30 menit, baik ke puskesmas, RSUD Anna Lasmanah maupun RSI Bawang;
   h. Tersedia sumber daya manusia tenaga kesehatan bidan dan dokter;

i. Akses ke posyandu dekat, mudah disertai aktivitas posyandu yang aktif;
j. Tingkat kepesertaan BPJS Kesehatan maupun ketenagakerjaan yang cukup tinggi di desa seperti Perangkat Desa,BPD,RT/RW,Posyandu,Pegawai BUMDes dan pekerja rentan;
k. Akses ke pendidikan dasar SD/MI, SMP/MTs maupun ke SMU/SMK/MA sangat dekat dan mudah;
l. Terpenuhinya sumber air minum yang layak bagi penduduk termasuk untuk mandi dan mencuci;
m. Mayoritas penduduk memiliki jamban sehat dan tempat pembuangan sampah yang dikelola oleh BUMDes dengan baik;
n. Penduduk telah memiliki rasio elektrifikasi mencapai 100% dengan kepemikilan dastang listrik sendiri;
o. Penduduk memiliki akses informasi dan komunikasi yang sangat baik yang dibuktikan dengan akses sinyal yang kuat dari bermacam penyedia layanan jaringan komunikasi termasuk di dalamnya akses internet.

2. Desa Madukara Kecamatan Madukara

Selain kenaikan pada indikator ketahanan sosial seperti yang terjadi pada Desa Pucang, kenaikan signifikan terdapat pada nilai indikator lingkungan, yang terdiri dari:

a. Pengelolaan sampah dan lingkungan yang baik sehingga tidak ada pencemaran air, tanah dan udara;
b. Terdapat sungai maupun irigasi yang debit airnya bersih bebas dari limbah sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan pertanian, perikanan maupun perkebunan;
c. Terdapatnya upaya atau tindakan terhadap potensi bencana alam (tanggap bencana, jalur evakuasi, peringatan dini dan ketersediaan peralatan penanganan bencana);

3. Desa Wanadadi Kecamatan Wanadadi

Kenaikan terjadi pada nilai indikator ketahanan sosial, terdiri dari:

a. Partisipasi kebiasaan gotong royong di desa, yang tercermin dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat maupun pembangunan selalu melibatkan swadaya gotong royong masyarakat;
b. Ketersediaan fasilitas dan lapangan olahraga yang dapat diakses masyarakat secara mudah dan gratis;
c. Terdapat kelompok kegiatan olahraga yang beragam seperti sepakbola, futsal, pencak silat dan golf;
d. Terjalinnya kerukunan dan toleransi keragaman agama di Desa;

e. Meningkatnya rasa aman penduduk yang dapat dilihat dari warga desa berpartisipasi aktif mengadakan siskamling, tingkat kriminalitas yang terjadi di desa rendah serta rendahnya tingkat konflik yang terjadi di desa;
f. Waktu tempuh ke prasarana kesehatan cukup singkat tidak lebih dari 30 menit, baik ke puskesmas maupun RSI Bawang;
g. Tersedia sumber daya manusia tenaga kesehatan bidan dan dokter;
h. Akses ke posyandu dekat, mudah disertai aktivitas posyandu yang aktif;
i. Tingkat kepesertaan BPJS Kesehatan maupun ketenagakerjaan yang cukup tinggi di desa seperti Perangkat Desa,BPD,RT/RW,Posyandu,Pegawai BUMDes dan pekerja rentan;
j. Akses ke pendidikan dasar SD/MI, SMP/MTs maupun ke SMU sangat dekat dan mudah;
k. Terpenuhinya sumber air minum yang layak bagi penduduk termasuk untuk mandi dan mencuci;
l. Mayoritas penduduk memiliki jamban sehat dan tempat pembuangan sampah yang dikelola oleh BUMDes dengan baik;
m. Penduduk telah memiliki rasio elektrifikasi mencapai 100% dengan kepemikilan dastang listrik sendiri;
n. Penduduk memiliki akses informasi dan komunikasi yang sangat baik yang dibuktikan dengan akses sinyal yang kuat dari bermacam penyedia layanan jaringan komunikasi termasuk di dalamnya akses internet.

4. Desa Penusupan Kecamatan Pejawaran

Desa Penusupan merupakan satu-satunya desa yang mencapai kenaikan pada semua indikator IDM, selain Indikator Ketahanan Sosial dan Ekologi seperti halnya pada Desa Pucang, Wanadadi dan Madukara, Desa Penusupan juga terdapat kenaikan yang cukup signifikan pada Indikator Ketahanan Ekonomi, antara lain:

a. Bertambahnya keragaman produksi masyarakat desa seperti pengolahan makanan, pengolahan kayu, jual beli sembako, jual beli alat kelistrikan, jual beli motor/mobil, jual beli alat/obat pertanian, kafe, simpan pinjam;
b. Tersedia pusat pelayanan perdagangan meliputi akses penduduk ke pusat perdagangan (pertokoan, pasar permanen), bertambahnya sektor perdagangan di permukiman (warung dan minimarket) serta berkembangnya usaha kedai makanan maupun kafe;
c. Terdapatnya akses distribusi/logistik yang terdiri dari kantor pos dan jasa logistik;

d. Tersedianya lembaga perbankan umum seperti BRI, Bank Perkreditan Rakyat seperti BPR BKK Mandiraja dan berkembangnya koperasi serta semakin mudahnya akses penduduk ke kredit;

e. Keterbukaan wilayah yang semakin luas mencakup sampai ke wilayah pinggiran di desa dengan terdapatnya moda transportasi angkutan *pick up*,ojek serta kualitas jalan desa yang semakin baik;

Tabel 3.12. Sebaran Desa Berdasarkan Status Kemajuan dan Kemandirian per Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023

No	Kecamatan	Tahun					Jumlah
		Sangat Tertinggal	Tertinggal	Berkembang	Maju	Mandiri	
1.	Susukan	-	-	12	3	-	15
2.	Purwareja Klampok	-	-	6	2	-	8
3.	Mandiraja	-	-	9	6	1	16
4.	Purwanegara	-	-	7	6	-	13
5.	B a w a n g	-	-	10	7	1	18
6.	Banjarnegara	-	-	4	-	-	4
7.	S i g a l u h	-	-	8	6	-	14
8.	Madukara	-	-	11	6	1	18
9.	Banjarmangu	-	-	10	7	-	17
10.	Wanadadi	-	-	6	4	1	11
11.	R a k i t	-	-	9	2	-	11
12.	Punggelan	-	-	16	1	-	17
13.	Karangkobar	-	-	10	3	-	13
14.	Pagentan	-	-	13	3	-	16
15.	Pejawaran	-	-	15	1	1	17
16.	B a t u r	-	-	7	1	-	8
17.	Wanayasa	-	-	7	9	1	17
18.	Kalibening	-	-	16	-	-	16
19.	Pandanarum	-	-	8	-	-	8
20.	Pagedongan	-	-	3	6	-	9
	Jumlah	-	-	187	73	6	266

Sumber Data : Keputusan Kemendes PDTT Nomor 174 Tahun 2023

Berdasarkan tabel dia atas, pada tahun 2023 jumlah desa sangat tertinggal dan tertinggal menjadi nol dengan status meningkat ke klasifikasi lebih tinggi. Realisasi Indikator Jumlah Desa Berstatus Mandiri Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

Tabel 3.13. Realisasi Indikator Jumlah Desa Berstatus Mandiri Tahun 2018-2023

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah Desa Berstatus Mandiri	Desa	2	2	2	2	2	6

Sumber Data : Pemutakhiran IDM Tahun 2018 – 2023

Gambar 3.2. Realisasi Indikator Jumlah Desa Berstatus Mandiri Tahun 2019-2023

Berdasarkan tabel diatas jumlah desa mandiri meningkat sangat signifikan dibanding tahun sebelumnya yang tidak terdapat kemajuan (jumlah stagnan). Realisasi Indikator Jumlah Desa Berstatus Mandiri dibandingkan Target Jangka Menengah sebagai berikut :

Tabel 3.14. Realisasi Indikator Jumlah Desa Berstatus Mandiri dibandingkan Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Renstra	Realisasi	Capaian (%)	Status Capaian
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah Desa Berstatus Mandiri	Desa	6	6	100	Sangat Baik

Sumber Data : Pengukuran Kinerja Dispermades PPKB Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, realisasi jumlah desa mandiri sudah mencapai target jangka menengah dengan capaian 100 persen. Artinya perkembangan tingkat kemajuan dan kemandirian desa sangat baik. Indeks Desa Membangun menggambarkan perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Rekapitulasi perkembangan dana desa tahun 2019 sampai dengan 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.15. Rekapitulasi Perkembangan Dana Desa Tahun 2019 - 2023

No	Kecamatan	Anggaran (Dalam ribuan)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1.	Susukan	14.265.032	14.778.049	14.523.750	8.441.784	16.584.062
2.	Purwareja Klampok	7,688,023	7.417.299	7.931.135	16.590.820	9.684.260
3.	Mandiraja	15.021.772	15.417.431	16.909.556	14.837.377	18.062.552
4.	Purwanegara	13.182.109	13.553.389	15.302.273	16.675.367	17.301.328
5.	B a w a n g	15.855.663	15.965.451	17.892.956	3.967.452	16.926.687
6.	Banjarnegara	3.975.479	3.832.127	4067.968	10.794.997	4.617.442
7.	S i g a l u h	11.629.223	11.651.922	11.292.849	15.194.633	12.608.866
8.	Madukara	15.131.598	15.338.965	15.605.698	15.190.636	15.722.562
9.	Banjarmangu	15.329.763	15.614.269	15.699.949	9.733.816	16.121.260
10.	Wanadadi	9.597.433	9.460.292	9.404.022	10.919.771	9.993.068
11.	R a k i t	10.092.511	10.529.412	10.486.767	19.922.897	12.358.393
12.	Punggelan	18.967.159	19.148.895	18.759.766	12.664.618	22.470.328
13.	Karangkobar	13.909.949	13.646.070	13.434.591	15..355.837	13.651.274
14.	Pagentan	15.537.360	16.013639	15.669.848	17.233.240	16.159.148
15.	Pejawaran	18.182.921	181.06.618	16.659.230	8.928.303	15.995.364

No	Kecamatan	Anggaran (Dalam ribuan)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
16.	B a t u r	8.577.547	86.11.191	8.488.235	19.139.746	8.764.798
17.	Wanayasa	18.318.383	190.35.310	17.791.138	16.514.795	17.417.179
18.	Kalibening	17.635.484	171.60.577	16.543.965	8.607.279	14.338.782
19.	Pandanarum	9.646.911	93.16.934	9.017.347	10.454.337	7.929.422
20.	Pagedongan	10.109.141	105.30.757	10.264.285	8.441.784	11.179.884
	Jumlah	**262.654.461**	**265.128.597**	**265.745.328**	**266.535.723**	**277.886.659**

Sumber Data : Data Dispermades PPKB

s

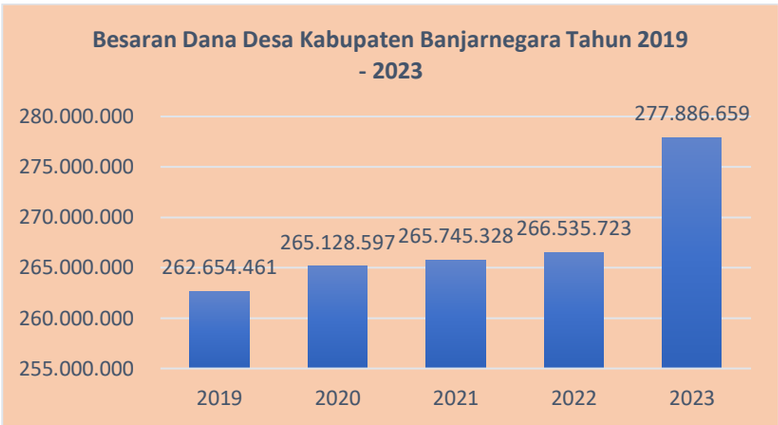

Gambar 3.3. Besaran Dana Desa Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 - 2023

Berdasarkan data di atas, dukungan Dana Desa meningkat dari tahun ke tahun. Dukungan dana desa tersebut terbukti mampu meningkatkan status kemajuan dan kemandirian desa.

Upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian :

1. Pemahaman desa terkait PMK Nomor 190 Tahun 2021 sudah cukup baik, khususnya pada indikator wajib yang mempunyai bobot tinggi dalam meraih Alokasi Kinerja, yakni perubahan skor dan perubahan status desa dalam IDM. Hal ini berpengaruh pada pengisian indikator penilaian yang lebih obyektif;
2. Data dan informasi dasar IDM dijadikan acuan program pembangunan desa untuk peningkatan strata IDM;
3. Adanya upaya desa dalam mengatur strategi kenaikan Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan / Ekologi;
4. Terciptanya konsolidasi yang efektif antara Dispermades PPKB, Aparat Kecamatan dan Tim Pendamping Profesional yang didukung Pendamping Desa maupun Pendamping Lokal Desa dalam mendata dan menginput potensi desa.

Upaya mempertahankan capaian :

1. Melaksanakan pendampingan kepada desa terutama berkaitan dengan indikator-indikator yang masih rendah dan berpengaruh pada peningkatan strata desa untuk sebagai bahan pertimbangan dalam proses perencanaan pembangunan berikutnya;
2. Melakukan pendampingan dan evaluasi intensif terkait proses pengisian indikator IDM sehingga hasil penilaian strata desa lebih akurat sehingga bisa sebagai bahan evaluasi;
3. Bekerjasama dengan pimpinan wilayah setempat yaitu Camat serta instansi terkait untuk bersama-sama secara intensif mengawal proses pembangunan desa agar desa semakin maju dan mandiri.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya :

Pencapaian sasaran strategis ke 2 didukung oleh sumberdaya manusia dan anggaran. Sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan program sebanyak 17 orang terdiri dari Golongan IV (3 orang), Golongan III (S1 : 4 orang, S2 : 1 Orang), Golongan II (2 orang) serta dibantu oleh 2 orang THL dan 2 Orang PPPK. Keseluruhan potensi sumber daya manusia tersebut tersebar pada tiga bidang dan masing-masing telah melaksanakan tugas dengan optimal. Selain itu, desa didampingi oleh 6 orang Tenaga Ahli Desa, 16 orang Pendamping Desa Teknik Infrastruktur dan 32 orang Pendamping Desa Pemberdayaan. Tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.16. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Sasaran Strategis Ke-1

Sasaran Strategis/ Indikator	Indikator			Anggaran (Rp)			Tingkat Efisiensi
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Sasaran : Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa **Indikator :** Jumlah Desa Berstatus Mandiri	3 Desa	6 Desa	200	6.165.222.000	6.090.385.614	98,79	1,21

Sumber Data : Pengukuran Knerja Dispermades PPKB Tahun 2023

Penggunaan sumberdaya untuk pencapaian indikator Jumlah Desa Berstatus Mandiri dengan anggaran Rp6.165.222.000,00 serta realisasi Rp6.090.385.614,00 (98,79%). Anggaran sebagaimana tersebut terbagi pada empat program yaitu (1). Program Penataan Desa, (2). Program Peningkatan Kerjasama Desa, (3). Program Administrasi Desa, (4). Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,

Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat. Capaian indikator program dan kegiatan yang mendukung sebagai berikut :

Tabel 3.17. Capaian Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan Sasaran Strategis Ke-1

No	Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
A.	Program Penataan Desa	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan Masyarakat	%	37,00	37,02	100,05
B.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Jumlah kerjasama antar desa	Dokumen	4	4	100,00
C.	Program Administrasi Desa	Persentase Desa yang terfasilitasi pembinaan pengelolaan administrasi desa	%	100,00	100,00	100,00
		Persentase desa yang terfasilitasi penetapan dan penegasan batas desa	%	50,00	56,39	112,78
		Jumlah BUMDes yang berkembang	BUMDes	6	18	300,00
D.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan Masyarakat	%	45	45	100,00
		Persentase pengembangan ekonomi desa	%	5	10	200,00
		Persentase desa yang memanfaatkan karya Teknologi Tepat Guna	%	2	2,63	131,50

Sumber Data : Pengukuran Kinerja Dispermades PPKB Tahun 2023

Capaian Realisasi output sub kegiatan yang mendukung sasaran ke 1 sebagai berikut :

1. Program Penataan Desa

Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa, dengan realisasi kinerja kegiatan yaitu Jumlah desa yang terfasilitasi penataan desa sebanyak 6 Desa.

- Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa, dengan output Jumlah sarana dan prasarana desa sebanyak 6 unit, dengan rincian sebagai berikut :
  a. Terlaksananya TMMD Sengkuyung I di Desa Pegundungan Kec. Pejawaran pada tanggal 10 Mei - 08 Juni 2023;
  b. Terlaksananya TMMD Sengkuyung II di Desa Gumelem Wetan Kec. Susukan pada tanggal 12 Juli - 10 Agustus 2023;
  c. Terlaksananya TMMD Sengkuyung III di Desa Ambal Kec. Karangkobar pada tanggal 20 September - 09 Oktober 2023;

d. Terlaksananya Karya Bhakti TNI pada 3 desa yaitu Desa Sijenggung Kecamatan Banjarmangu, Desa Brengkok Kecamatan Susukan dan Desa Pingit Kecamatan Rakit;
e. Terlaksananya fasilitasi pencairan bankeu infrastruktur Provinsi Jawa Tengah sebanyak 373 titik dari total 373 titik;
f. Terlaksananya fasilitasi pencairan bankeu khusus sebanyak 26 titik dari total 195 titik.

2. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar Desa, dengan realisasi kinerja kegiatan yaitu Jumlah kawasan perdesaan yang terbentuk sebanyak 4 Kawasan (Kawisesa – Sigaluh, Pajang Kaloka – Banjarmangu, Manggera – Pejawaran, Kalimasada – Kalibening)

- Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, dengan output Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan sebanyak 4 Dokumen (Perdes Tentang Kerjasama Desa, SK Lembaga Kerjasama Desa (LKD), SK Perwakilan Desa dalam BKAD, Peraturan Bersama Kepala Desa (Permakades) tentang Kerjasama Antar Desa):

3. Program Administrasi Desa

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, dengan realisasi kinerja kegiatan sebagai berikut ;

a. Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan administrasi desa sebanyak 266 desa (s.d Triwulan IV Tahun 2023);
b. Jumlah Desa yang memiliki batas desa sebanyak 162 desa;
c. Jumlah Desa yang memiliki BUMDes Aktif sebanyak 124 desa.

Output Sub kegiatan yang mendukung sebagai berikut :

a) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, dengan output Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi pemerintah desa sebanyak 15 dokumen (Pekandangan-Banjarmangu, Mantrianom-Bawang, Penawangan-Madukara, Jalatunda, Salamerta-Mandiraja, Pegedongan-Pagedongan, Mlaya-Punggelan, Tlaga-Punggelan, Gambol-Pejawaran, Purwonegoro-Purwanegara, Wanacipta-Sigaluh, Kandangwangi-Wanadadi, Karanggondang-Karangkobar, Adipasir-Rakit).
b) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa, dengan output Jumlah dokumen hasil penyusunan perencanaan pembangunan desa sebanyak 20 dokumen;

c) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, dengan output Jumlah dokumen pengelolaan keuangan desa sebanyak 266 desa (s.d Bulan Desember Tahun 2023), dengan rincian :
   1) Jumlah desa yang terfasilitasi penyaluran DD dan ADD sebanyak 266 desa
   2) Jumlah fasilitasi Siskeudes (12 bulan) sebanyak Rp120.000.000,00;
   3) Jumlah pembayaran BPJS bagi kepala desa dan perangkat desa sebesar Rp3.231.251.264,00.

d) Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, dengan output Jumlah aparatur pemerintah desa yang megikuti pembinaan peningkatan kapasitas sebanyak 470 orang, dengan rincian ;
   1) 50 orang pada peningkatan kapasitas Perangkat Desa tanggal 15-16 Maret 2023;
   2) 420 orang pada pekan olahraga desa (PORADES) pada 12-27 November 2023, dengan juara 4 Cabang Olahraga yaitu :
      a) Bulu tangkis (Juara I - Kec. Madukara, Juara II - Kec. Kalibening, Juara III bersama - Kec.Wanayasa dan Banjarmangu);
      b) Tenis Meja (Juara I - Kec. Purwanegara, Juara II - Kec. Madukara, Juara III bersama - Kec.Rakit dan Sigaluh);
      c) Bola Voli - Putra (Juara I - Kec. Punggelan, Juara II - Kec. Wanayasa, Juara III bersama - Kec.Madukara dan Banjarmangu);
         Bola Voli - Putri (Juara I - Kec. Pejawaran, Juara II - Kec. Punggelan, Juara III bersama - Kec.Sigaluh dan Wanayasa);
      d) Sepak Bola (Juara I - Kec. Kalibening, Juara II - Kec. Mandiraja, Juara III bersama - Kec.Madukara dan Wanayasa);

e) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa, dengan output Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan lembaga kerjasama antar desa sebanyak 52 Dokumen.

f) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dengan output Jumlah laporan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sebanyak 4 laporan yaitu Desa Pagentan Kec. Pagentan, Desa Rejasari Kec. Banjarmangu, Desa Wanacipta Kec. Sigaluh dan Desa Lengkong Kec. Rakit.

g) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa, dengan output Jumlah dokumen hasil pengelolaan aset desa sebanyak 6 dokumen (Desa Ampelsari Kec. Banjarnegara, Desa Pandansari Kec.Wanayasa, Desa Aribaya Kec. Pagentan, Tanjungtirta - Punggelan, Danakerta - Punggelan, Duren - Pagedongan).

h) Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD, dengan output Jumlah anggota BPD yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas sebanyak 778 orang.

i) Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa, dengan output Jumlah desa yang difasilitasi dam penetapan dan penegasan batas desa sebanyak 74 Desa (Kecamatan Bawang (18), Kecamatan Rakit (11), Kecamatan Wanadadi (11), Punggelan Kecamatan (17), Kecamatan Pandanarum (8), Kecamatan Pagedongan (9).

j) Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan, dengan output Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan sebanyak 3 Dokumen. Dengan rincian :

   a) Juara I Desa Madukara Kec. Madukara;
   b) Juara II Desa Pekandangan Kec. Banjarmangu;
   c) Juara III Desa Blambangan Kec. Bawang.

4. **Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat** /

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota, sengan realisasi indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

- Persentase lembaga kemasyaraatan yang berpartisipasi aktif dalam perencanaan desa sebanyak 55 persen.
- Persentase peningkatan usaha eknomi perdesaan sebanyak 5 persen.
- Persentase desa yang memanfaatkan karya Teknologi Tepat Guna sebanyak 2,63 persen.

Output Sub kegiatan yang mendukung sebagai berikut :

a) Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Dewa/Kelurahan dan

Masyarakat Hukum Adat dengan output Jumlah dokumen hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat sebanyak 9 Dokumen yaitu :

1) Penilaian Lomba Tingkat Provinsi Jateng untuk Posyandu Tri Lestari II Dusun Pesanggrahan Desa Jenggawur Kec. Banjarmangu.1 (Juara I Tk. Provinsi);
2) Penilaian Lomba Posyandu Tingkat Kabupaten (Berita Acara Hasil Penilaian Nomor 411.4/636/2023, tanggal 11 Oktober 2023) : Juara 1 - Posyandu Tri Utami I Desa Sirukun Kec. Kalibening, Juara II - Posyandu Damai 2 Desa Kayuares Kec. Pagentan, Juara III - Posyandu Murih Raharjo 1 Desa Kepakisan Kec. Batur;
3) Hibah Uang kepada Tim Penggerak PKK Desa Wanayasa Kec. Wanayasa (NPHD Nomor : 978/699/PERMADESPPKB/TAHUN 2023);
4) Hibah Uang kepada Karang Taruna Perisai Muda Desa Pekandangan Kec. Banjarmangu (NPHD Nomor : 978/700/PERMADESPPKB/TAHUN 2023);
5) Hibah Uang kepada Karang Taruna Eka Sapta Desa Kalisatkidul Kec. Kalibening (NPHD Nomor : 978/701/PERMADESPPKB/TAHUN 2023);
6) Penataan Kelembagaan Posyandu di Desa Prigi Kec. Sigaluh pada tanggal 31 Oktober 2023;
7) Penataan Kelembagaan Posyandu di Desa Jenggawur Kec. Banjarmangu pada tanggal 01 November 2023;
8) Penataan Kelembagaan Posyandu di Desa Sawal Kec. Sigaluh pada tanggal 02 November 2023;
9) Penataan Kelembagaan Posyandu di Desa Kutabanjarnegara Kec. Banjarnegara pada tanggal 07 November 2023.

b) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, dengan output Jumlah lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat sebanyak 65 kelembagaan;

c) Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga, dengan output Jumlah dokumen hasil fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga sebanyak 36 dokumen.

d) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, dengan output Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa sebanyak 36 desa.

e) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, dengan output Jumlah laporan hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna sebanyak 4 dokumen.

Dengan rincian sebagai berikut : 1. Karya TTG Plasma Generator (Juara I), 2. Karya TTG Moc.Way Driyer / Penghilang asap (Juara II), 3. Silar Driyer System Hibrid (Juara III), 4. Incernerator Pemusnah Sampah (Juara Harapan I).

Sasaran 3 : Terkendalinya angka kelahiran total (TFR)

Pencapaian sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat diukur melalui 2 (dua) indikator Angka Kelahiran Total (TFR) dan Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19).

1. Angka Kelahiran Total (TFR)

Angka kelahiran total adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya (15-49 tahun). Angka Kelahiran Total adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya (15-49 tahun). TFR dihitung dengan menjumlahkan nilai semua ASFR dikalikan 5 dibagi 1.000, yang menggambarkan tingkat kelahiran per wanita usia subur. TFR dinyatakan dengan rata-rata jumlah kelahiran hidup laki-laki dan wanita pada setiap wanita yang hidup hingga akhir masa reproduksinya.

Fertilitas atau angka kelahiran penduduk memiliki peranan dalam rangka pengambilan kebijakan pengendalian penduduk serta pembangunan keluarga berkualitas. Pengambilan kebijakan kependudukan untuk saat ini terutama berkaitan dengan bonus demografi, Bonus demografi merupakan

kondisi dimana penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dibandingkan usia tidak produktif (dibawah 15 tahun dan diatas 65 tahun).

Indonesia telah mengalami bonus demografi sejak tahun 2015 dengan periode puncaknya diperkirakan terjadi pada periode 2020-2035. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Banjarnegara, jumlah pada tengah tahun 2023 sebesar 1.054.804. dari jumlah tersebut, jumlah penduduk usia produktif sebanyak 724.030 atau 68,64 persen dan Jumlah usia tidak produktif sebesar 330.774 atau 31,36 persen. Berdasarkan data tersebut, maka rasio ketergantungan atau beban tanggungan sebesar 45,69 persen. Rasio 45,69 persen artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 45 - 46 penduduk tidak produktif.

Periode bonus demografi dapat memiliki periode yang lebih panjang apabila TFR dapat ditekan. Apabila TFR bisa ditekan maka penambahan jumlah penduduk usia tidak produktif yang menjadi beban bisa menurun atau dijaga agar tidak lebih tinggi dibandingkan proporsi penduduk produktif. Menurunnya TFR akan meningkatkan jumlah usia produktif karena mengurangi proporsi jumlah usia tidak produktif. Jumlah penduduk usia produktif yang besar dan berkualitas dapat berperan sebagai sumber tenaga kerja dan pelaku ekonomi yang dapat mempercepat pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.

Target Angka Kelahiran Total (TFR) nasional Tahun 2023 sebesar 2,19, sedangkan target Provinsi Jawa Tengah sebesar provinsi sebesar 1,91 rata-rata anak per wanita usia 15-49 tahun. Target dan realisasi serta capaian Angka Kelahiran Total (TFR) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.18. Capaian Indikator Angka Kelahiran Total (TFR)

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Status Capaian
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
Terkendalinya angka kelahiran total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka	2,08	1,65	120,67	Sangat Baik

Sumber Data : Pengukuran Kinerja Dispermades PPKB, 2023

Berdasarkan hasil formulasi perhitungan Angka Kelahiran Total (TFR) dengan data dasar kependudukan tengah Tahun 2023 dari Dindukcapil Kabupaten Banjarnegara serta angka kelahiran dari Dinas Kesehatan, realisasi TFR sebesar 1,65 rata-rata anak Wanita per usia 15-49 tahun. Angka Kelahiran Total 1,65 artinya rata-rata wanita sampai dengan akhir masa reproduksinya melahirkan 1 - 2. Angka tersebut telah mencapai target dengan capaian 120,67 persen (sangat baik). Hal tersebut menunjukkan bahwa Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pengendalian penduduk

khususnya pengendalian kelahiran tepat sasaran dan tercapai dengan sangat baik. Angka Kelahiran Total (TFR) kabupaten merupakan komposit dari angka kelahiran total kecamatan. Capaian angka kelahiran total per kecamatan sebagai berikut :

Tabel 3.19. Angka Kelahiran Total (TFR) per Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Kelahiran Total	Jumlah wanita usia 15-49 tahun	TFR
1	***2***	***3***	***4***	***5***
1.	Susukan	732	16.266	1,58
2.	Purwareja Klampok	581	12.025	1,67
3.	Mandiraja	1.044	20.725	1,71
4.	Purwanegara	1.067	21.723	1,67
5.	B a w a n g	743	16.680	1,57
6.	Banjarnegara	755	18.169	1,47
7.	S i g a l u h	334	8.336	1,42
8.	Madukara	488	11.676	1,50
9.	Banjarmangu	586	11.730	1,76
10.	Wanadadi	431	8.821	1,67
11.	R a k i t	701	13.931	1,70
12.	Punggelan	1.180	23.301	1,69
13.	Karangkobar	436	8.283	1,78
14.	Pagentan	449	10.144	1,48
15.	Pejawaran	571	11.556	1,69
16.	B a t u r	649	10.792	2,06
17.	Wanayasa	631	12.953	1,63
18.	Kalibening	626	11.935	1,75
19.	Pandanarum	243	5.913	1,33
20.	Pagedongan	566	11.288	1,71

Sumber Data : Pengukuran Kinerja Dispermades PPKB, 2023

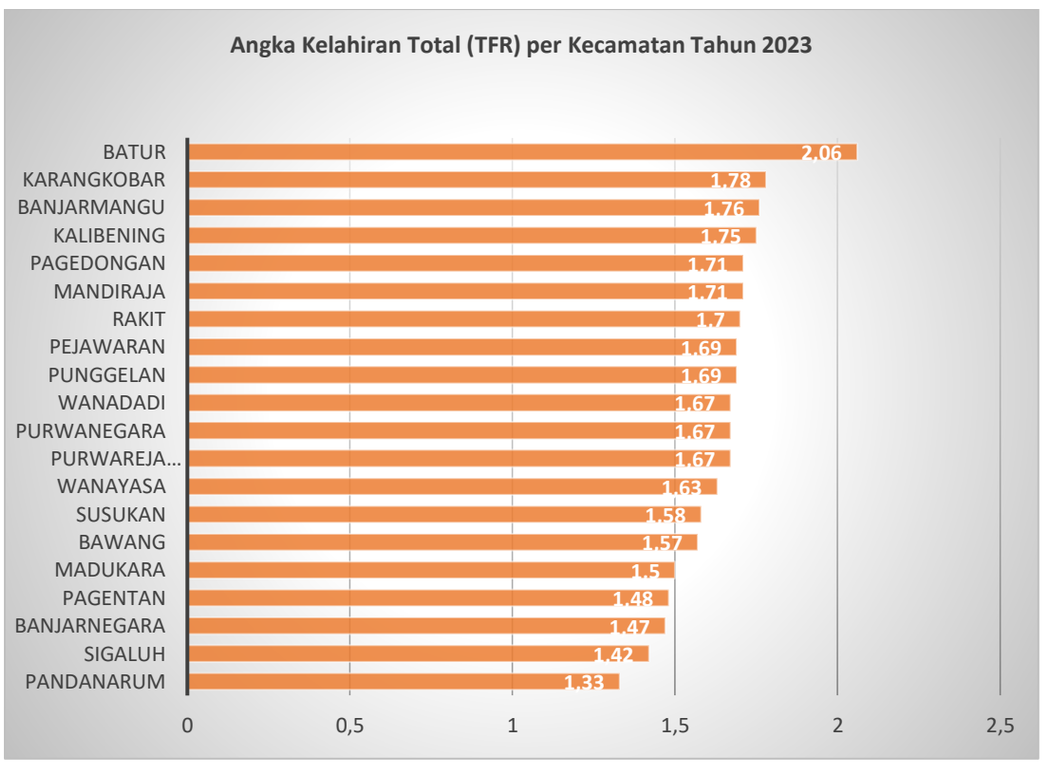

Gambar 3.4. Angka Kelahiran Total (TFR) per Kecamatan Tahun 2023

Berdasarkan data di atas, angka kelahiran total yang masih di angka 2 yaitu Kecamatan Batur. Sedangka 19 kecamatan lainnya sudah dibawah angka 2, dengan angka kelahiran terendah yaitu 1,33 di Kecamatan Pandanarum. Adanya perbedaan angka kelahiran total di tiap kecamatan menunjukkan bahwa program pengendalian penduduk tidak disamakan antar kecamatan. Untuk daerah-daerah dengan TFR masih diatas 2,1 maka arah program pengendalian penduduk adalah dengan menurunkan fertilitas sampai pada angka 2,1 anak per perempuan, sementara untuk wilayah dengan TFR sudah dibawah 2 maka arah program pengendalian penduduk adalah fokus pada peningkatan kualitas hidup, peningkatan kualitas SDM dan peningkatan kualitas pelayanan dasar untuk Masyarakat. Realisasi Indikator Angka Kelahiran Total (TFR) dibandingkan dengan tahun sebelumnya ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.20. Realisasi Indikator Angka Kelahiran Total (TFR) Tahun 2019-2023

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka	2,18	2,108	1,94	1,75	1,65

Sumber Data : Pengukuran Kinerja Dispermades PPKB, 2019-2023

Gambar 3.5. Realisasi Indikator Angka Kelahiran Total (TFR) Tahun 2019-2023

Berdasarkan data di atas, angka kelahiran total terus menurun, hal ini berpengaruh baik untuk memperpanjang masa bonus demografi. Namun demikian, angka kelahiran total yang menurun terlalu cepat dapat mengganggu pertumbuhan penduduk seimbang. Pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas yang ditandai dengan menurunnya angka fertilitas (TFR) menjadi 2,1 dan Net Reproductive Rate (NRR) = 1. Sehingga untuk selanjutnya penurunan selama kurun waktu 2019 sampai dengan 2023 bisa menjadi bahan evaluasi dalam penentuan kebijakan

kependudukan berikutnya. Realisasi Indikator Angka Kelahiran Total (TFR) Perangkat Daerah dibandingkan Target Jangka Menengah ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.21. Realisasi Indikator Angka Kelahiran Total (TFR) Perangkat Daerah dibandingkan Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Renstra	Realisasi	Capaian (%)	Status Capaian
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka	2,02	1,65	118,32	Sangat Baik

Sumber Data : Pengukuran Kinerja Dispermades PPKB, 2019-2023

Berdasarkan target di atas, realisasi target jangka menengah sudah tercapai, dengan capaian 118,32 persen. Perbandingan realisasi kabupaten dibandingkan target nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.22. Realisasi Indikator Angka Kelahiran Total (TFR) Kabupaten dibandingkan Target Nasional dan Target Provnsi Jawa Tengah Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Nasional	Target Provinsi	Realisasi Kabupaten
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka	2,14	2,15	1,75

Sumber Data : Renstra BKKBN, 2020-2024

Hal-hal yang mendukung pencapaian TFR

1. Capaian Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49 sangat baik. Hal ini sangat berpengaruh pada perencanaan kehamilan lebih efektif sehingga berdampak dengan menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan. Dengan jumlah dan jarak kelahiran yang terkendali dan terencana dapat mencegah kejadian stunting, mencegah kekurangan gizi pada anak, dan tumbuh kembang anak lebih terpantau sehingga meningkatkan derajat kesehatan anak Indonesia;
2. Capaian Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) tercapai dengan baik. Pemakaian alat kontrasepsi jangka panjang lebih efektif dalam perencanaan pengaturan kehamilan serta memiliki jangka waktu yang lebih lama serta tingkat kegagalan yang lebih sedikit. Dengan mengatur kehamilan dan mewujudkan setiap kelahiran menjadi kelahiran yang terencana dapat meningkatkan peran keluarga dalam pengasuhan anak menjadi generasi unggul dan berdaya saing dimasa mendatang;

3. Kerjasama dan koordinasi yang sangat baik antar instansi, tokoh Masyarakat, petugas lini lapangan serta dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi sehingga Program Bangga Kencana bisa terlaksana dengan sangat baik.

Tantangan pencapaian TFR

1. Masih adanya pernikahan dini yang berpotensi pada terjadinya kehamilan remaja;
2. Masih adanya PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need), yang berpotensi pada terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan;
3. Penduduk tumbuh seimbang tercapai saat TFR 2,1 anak per perempuan dan *Net Reproduction Rate* (NRR) sebesar 1. Kabupaten Banjarnegara memiliki kecenderungan menurun dari tahun-tahun sebelumnya dengan capaian tahun 2023 sebesar 1,65 anak per Perempuan. Oleh karena itu, dengan TFR yang rendah tersebut, maka fokus pembangunan kependudukannya harus diarahkan pada peningkatan kualitas SDM dan peningkatan kualitas pelayanan dasar agar cita-cita untuk mencapai SDM Unggul Indonesia maju dapat benar-benar terwujud pada tahun 2045.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya :

Pencapaian sasaran strategis ke 2 didukung oleh sumberdaya manusia dan anggaran. Sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan program sebanyak 14 orang terdiri dari Golongan IV (4 orang), Golongan III (S1 : 4 orang, SLTA : 1 Orang), Golongan II (orang) serta dibantu oleh 2 Orang PPPK, 1 orang PTT dan 2 orang THL. Keseluruhan potensi sumber daya manusia tersebut tersebar pada dua bidang dan masing-masing telah melaksanakan tugas dengan optimal. Selain itu dalam pelaksanaan penggerakan dan pelayanan KB di lapangan, Dispermades PPKB didukung oleh petugas Penyuluh KB sebanyak 30 PNS, 4 PPPK yang tersebar di 20 kecamatan se-Kab. Banjarnegara.

Selain aparat kabupaten dan penyuluh KB pelaksanaan Program KB juga dibantu oleh 278 orang Pembantu KB Desa (PPKBD), 1.343 orang Sub PPKBD (Tingkat RW) dan 513 Kelompok KB (Tingkat RT) dan keseluruhan pelaksana tersebut merupakan potensi sumberdaya dan telah melaksanakan tugas dengan optimal dilihat dari tercapainya target kinerja. Tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.23. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Sasaran Strategis Ke-3

Sasaran Strategis/ Indikator	Indikator			Anggaran (Rp)			Tingkat Efisiensi
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Sasaran : Terkendalinya angka kelahiran total (TFR) **Indikator :** Angka Kelahiran Total	2,08	1,65	120,67	6.822.665.400	6.126.971.519	89,02	10.98

Sumber Data : Dispermades PPKB Tahun 2023

Berdasarkan data di atas, penggunaan sumberdaya sudah efisien karena persentase penggunaan anggaran lebih sedikit dari capaian kinerja. Capaian kinerja sebesar 120,67 persen, sedangkan persentase realisasi anggaran sebesar 89,02 sehingga penggunaan sumberdaya sudah efisien. Anggaran sebagaimana tersebut terbagi pada dua program yaitu (1). Program Pengendalian Penduduk, dan (2). Program Pembinaan Keluarga Berencana. Capaian indikator program dan kegiatan yang mendukung sebagai berikut :

Tabel 3.24. Capaian Indikator Program, Sasaran Strategis Ke-3

No	Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
A.	Program Pengendalian Penduduk	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Dokumen	1	1	100,00
		Cakupan penyediaan data keluarga di setiap desa/kelurahan	%	100,00	100,00	100,00
B.	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	%	76,59	81,24	106,07
		Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	15,00	4,88	167,47
		Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan Masyarakat	%	100,00	161,87	161,87
		Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	32,58	35,10	107,73
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	6,96	6,37	108,48

Sumber Data : Pengukuran Kinerja Dispermades PPKB Tahun 2023

Tabel 3.25. Capaian Indikator Program yang Mendukung TFR Tahun 2019-2023

Program	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Program Pengendalian Penduduk	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Dokumen	2	2	2	2	1
	Cakupan penyediaan data keluarga di setiap desa/kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Program Pembinaan Keluarga Berencana	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	%	79,77	80,24	76.09	77,20	81,24
	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	NA	NA	NA	NA	4,88
	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan Masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	161,87
	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	30,06	31,64	32,08	32,42	35,10
	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	6,84	6,91	6,98	6,99	6,37

Sumber : Pengukuran Kinerja Dispermades PPKB Tahun 2023

Capaian Realisasi output sub kegiatan yang mendukung sasaran ke 3 sebagai berikut :

a. Program Pengendalian Penduduk

1) Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Penduduk Kabupaten, dengan capaian indikator kegiatan Jumlah sektor/instansi yang terlibat dalam pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk sebanyak 1 sektor (Pendidikan).

- Sub Kegiatan Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal, dengan output Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal sebanyak 2 laporan, sebagai berikut :

a) Sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan pd tgl 10 Mei 2023 bagi 40 Guru di Aula SMAN 1 Karangkobar;
b) Sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan pd tgl 26 Mei 2023 bagi 51 peserta didik di Aula SMAN 1 Karangkobar.

2) Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten.Kota, dengan realisasi indikator kegiatan yaitu
   - Jumlah dokumen pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota sebanyak 12 dokumen (Januari - Desember 2023);
   - Persentase Perangkat Daerah (dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB sebanyak 45 persen;
   - Cakupan keluarga berisiko Stunting yang memperoleh pendampingan sebesar 40 persen.

   Output sub kegiatan yang mendukung sebagai berikut :
   a) Sub Kegiatan Perumusan Parameter Kependudukan, dengan output Jumlah Laporan Parameter Kependudukan yang dirumuskan sebanyak Dokumen (Januari - Desember 2023)
   b) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga, dengan output Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga sebanyak 20 Laporan (Januari s.d Desember 2023)
   c) Sub Kegiatan Pencatatan dan pengumpulan Data Keluarga, dengan output Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga sebanyak 20 Laporan (Januari s.d Desember 2023)
   d) Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB, dengan output Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB sebanyak 3 dokumen (Januari s.d Desember 2023).

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana

1) Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal, dengan realisasi indikator kegiatan yaitu Cakupan wilayah yang terinterfensi program bangga kencana sebanyak 100 persen.

a) Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja, dengan output Jumlah organisasi yang mendapatkan advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada stakeholder dan mitra kerja sebanyak 35 Organisasi. Dengan rincian sebagai berikut ;
   - Terlaksananya Rakor Tim Percepatan Penurunan Stunting pada tanggal 17 April 2023 di Aula Baperlitbang Kab. Banjarnegara sebanyak 30 orang;
   - Terlaksananya Orientasi Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting bagi PIK - Remaja pada tanggal 21 Mei 2023 di Balai Desa Tanjungtirta Kec. Punggelan (30 orang) dan pada tanggal 22 Mei 2023 Aula SMKN 2 Bawang (30 orang).
   - Terlaksananya Kegiatan Launching Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) pada tanggal 15 Juni 2023 di Balai Desa Petuguran Kec. Punggelan sebanyak 100 Peserta dari unsur Pimpinan Daerah (Pj. Bupati), OPD terkait, 14 Camat di wilayah kemiskinan ekstrim, 14 Koordinator PKB, Forkompincam Punggelan, Lintas Sektor, Kec. Punggelan, TP PKK Kabupaten dan Kecamatan, Kader Posyandu dan Tim Pendamping Keluarga.;
   - Terlaksananya Rembug Stunting Tingkat Kabupaten pada tanggal 11 Juli 2023 di Pendopo Dipayudha Adigraha;
   - Terlaksananya Peringatan HARGANAS Nasional XXX pada tanggal 21 Juli 2023 di TRMS Serulingmas Banjarnegara.;
   - Terlaksananya rapat koordinasi Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting pada tanggal 24 November 2023 di Aula Dispermades PPKB.

b) Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang, dengan output Jumlah dokumen promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang sebanyak 15 dokumen. Dengan rincian di bawah ini :
   1. Jumlah penayangan spot radio sebanyak 1.459 siar;

2. Jumlah spanduk standart yang dicetak sebanyak 80 meter (22 buah);
3. Jumlah kesenian tradisional yang digelar sebanyak 8 paket (Banjarmangu, Purwareja Klampok, Punggelan, Karangkobar, Pandanarum, Pagentan, Pejawaran, Kalibening);
4. Jumlah mug yang diadakan sebanyak 750 buah;
5. Jumlah tas yang diadakan sebanyak 150 buah;
6. Jumlah payung yang diadakan sebanyak 100 buah.;
7. Jumlah kaos lapangan yang diadakan sebanyak 68 buah;
8. Jumlah kaos olahraga yang diadakan seanyak 220 buah;
9. Jumlah pelaksanaan pemeliharaan baliho sebanyak 3 paket (depan Inspektorat, selatan alun-alun dan Kel. Parakancanggah/Timur Dispermades PPKB);
10. Jumlah sewa organ tunggal yang diadakan sebanyak 1 paket;
11. Jumlah running text yang diadakan sebanyak 1 paket;
12. Jumlah video visual yang diadakan sebanyak 1 paket;
13. Jumlah X Banner yang diadakan sebanyak 100 buah;
14. Jumlah cetak buku khutbah yang diadakan sebanyak 100 eksemplar;
15. Jumlah cetak buku menu DASHAT sebanyak 200 eksemplar.

c) Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok), dengan output Jumlah laporan mekanisme operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) melalui Rapat Koordinasi Kecamatan Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) sebanyak 200 laporan.

d) Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK, dengan output Jumlah laporan hasil pengelolaan operasional dan sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sebanyak 20 laporan (Januari s.d Desember 2023).

e) Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK, dengan output Jumlah laporan hasil pengendalian program KKBPK sebanyak 2 laporan dengan rincian;

1. Terlaksananya Sosialisasi Audit Kasus Stunting Tahun 2023 pada tanggal 23 Februari 2023 di Aula RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara;
2. Terlaksananya Kegiatan Kunjungan Lapangan kepada sasaran AKS pada tanggal 31 Mei di Desa Joho Kec. Bawang, Desa Kalitengah Kec. Purwanegara, Desa Sirukem Kec. Kalibening, Desa Balun Kec. Wanayasa, Desa Kalilunjar Kec. Banjarnangu, Desa Giritirta Kec. Pejawaran, Desa Dawuhan Kec. Wanayasa, Desa Jatilawang Kec, Wanayasa;
3. Terlaksananya Kegiatan Diseminasi Audit Kasus Stunting pada tanggal 23 Juni 2023 di Gedung PKK Kab. Banjarnegara yang diikuti oleh 40 orang terdiri dari 8 OPD, Koordinator PKB, TA Stunting dan Tim Pakar (4 dokter spesialis);
4. Terlaksananya Kunjungan Lapangan Audit Kasus Stunting secara serentak di 20 Kecamatan pada tanggal 24-28 Juli 2023 oleh Koordinator Penyuluh KB didampingi Tim Pendamping Keluarga;
5. Terlaksananya acara Rencana Tindak Lanjut AKS 1 dan Identifikasi AKS 2 Tahun 2023 pada tanggal 6 September 2023 di Aula Gedung PKK Kab. Banjarnegara;
6. Terlaksananya Kegiatan Kunjungan Lapangan oleh Tim AKS kepada sasaran AKS pada 23-24 Oktober Tahun 2023;
7. Terlaksananya kajian kasus dan rekomendasi Tim Pakar AKS Tahap II pada tanggal 02 November 2023 di Aula RSU Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara

2) Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), dengan realisasi indikator kegiatan yaitu Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk sebanyak 100 persen.

a) Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB, dengan output Jumlah organisasi yang mengikuti pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di lini lapangan oleh PKB/PLKB sebanyak 3.240 Organisasi.

b) Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Mayarakat Pedesaan (IMP), dengan output Jumlah kader yang mengikuti penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) sebanyak 11.240 orang, dengan rincian sebagai berikut :
   - ❖ Jumlah kader yang mengikuti penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) BOKB sebanyak 11.120 orang;
   - ❖ Jumlah kader yang mengikuti penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Rakor Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting) pada tanggal 15 Mei 2023 di Aula Dispermades PPKB sebanyak 40 orang;
   - ❖ Jumlah kader yang mengikuti penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Rakor Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting) pada tanggal 07 Agustus 2023 di Aula Dispermades PPKB sebanyak 20 orang.

3) Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota, dengan realisasi indikator kegiatan sebagai berikut
   - ❖ Jumlah fasilitas kesehatan yang mendapatkan distribusi alokon sebanyak 56 faskes (Triwulan IV Tahun 2023);
   - ❖ Jumlah PUS yang terlayani KB MKJP sebanyak 5.207 Orang;
   - ❖ Jumlah PUS yang mendapatkan pembinaan pelayanan KB 12.573 Orang
   - ❖ Jumlah fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya yang mendapatkan pembinaan pelayanan KB sebanyak 56 Faskes.

   Output sub kegiatan yang mendukung sebagai berikut :

   a) Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya, dengan output Jumlah laporan pengendalian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya sebanyak 56 Laporan (56 Faskes selama 12 bulan)
   b) Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka panjang (MKJP), dengan output Jumlah orang yang mengikutikesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka

Panjang (MKJP) sebanyak 5.207 Orang (IUD : 828, Implant : 4.171, MOW : 200, MOP : 8).

Didukung kegiatan lini lapangan sebagai berikut

- Jumlah orang yang mengikuti Rapat Koordinasi Pelayanan KB Hut Muslimat NU pada tanggal 19 Januari 2023 di Aula Dispermades PPKB sebanyak 30 Orang;
- Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Kontrasepsi Mantap MOP dan MOW bagi PPKBD dan Sub PPKBD pada tanggal 2 Maret 2023 di Aula Dispermades PPKB sebanyak 60 orang;
- Jumlah organisasi masyarakat yang mengikuti rapat evaluasi pelayanan KB pada tanggal 3 Maret 2023 di Gedung PKK sebanyak 30 Orang;
- Jumlah orang yang mengikuti Rapat Koordinasi Pelayanan KB Momentum Aisyiyah Tahun 2023 pada tanggal 04 Mei 2023 di Gedung Aisyiyah Kab. Banjarnegara sebanyak 30 Orang;
- Jumlah Akseptor KB Lestari tingkat Kabupaten sebanyak 3 (tiga) orang ditetapkan pada 22 Mei 2023 sebagai berikut : (1). Mohammad Hermanto / Siti Khamsiyah; (2). Prayitno/Warsiyem; (3). Mudasir/Siti Fatonah.
- Jumlah orang yang mengikuti peningkatan kapasitas KB Pria pada tanggal 05 Juli 2023 di Aula Dispermades PPKB sebanyak 40 Orang;
- Jumlah orang yang mengikuti Rapat Koordinasi Pelayanan KB MKJP dalam rangka HUT TMKK Tahun 2023 sebanyak 70 orang pada tanggal 13 September 2023 di Aula Sasana Abdi Praja Setda.

c) Sub Kegiatan Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP, dengan output yaitu Jumlah laporan dukungan ayoman komplikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP sebanyak 2 laporan dengan rincian :

- an. Ny. Misriyati Gunungjati RT 02 RW 03 Kec. Pagedongan kegagalan KB MOW untuk biaya Paket Persalinan sebanyak Rp800.000,00;

- an. Ny. Hamidah Salamerta RT 12 RW2 Kec. Mandiraja Kegagalan IUD untuk biaya Paket Persalinan sebanyak Rp700.000,00.

Didukung kegiatan lapangan :

- ❖ Terlaksananya Rapat Tim Jaga Mutu pada tanggal 04 Juli 2023 (6 orang) di Aula Dispermades PPKB;
- ❖ Terlaksananya Rapat Evaluasi Kegagalan dan Komplikasi Pelayanan KB pada tanggal 27 Juli 2023 (35 Kepala Puskesmas, RSUD, RSI, Tim Jaga Mutu) di Gedung PKK Kab. Banjarnegara;
- ❖ Terlaksananya rapat pembelajaran audit kasus kegagalan dan komplikasi pemakaian MKJP Tahun 2023 (Kepala Bidang Kesehatan, Ketua PC IBI, Ketua P2KP Kab. Banjarnegara, Koordinator Penyuluh KB) pada tanggal 9 Agustus 2023 di Gedung PKK Kab.Banjarnegara.

d) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB, dengan output Jumlah unit sarana penunjang pelayanan KB sebanyak 243 unit (Genset : 2, Pompa Air : 2, AC : 8, Dispenser : 1, Sofa : 1, Tangki air : 3, Meja staf : 24, Kursi susun : 160, Lemari Arsip : 20, PC All in one : 9, Printer scan : 6, Printer ADF : 3, Rehab Balai KB 4 (Pagedongan, Purwareja Klampok, Punggelan, Pandanarum)).

e) Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya, dengan output Jumlah laporan hasil pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya sebanyak 56 Laporan s.d Triwulan IV Tahun 2023).

Didukung kegiatan lini lapangan sebagai berikut :

- ❖ Terlaksananya Rakor Pelayanan KB bagi Fasilitas Kesehatan (Faskes) / Puskesmaspada tanggal 8 Februari 2023 sebanyak 36 Faskes;
- ❖ Terlaksananya Rapat Evaluasi Pelayanan KB Tahun 2023 bagi Bidan Puskesmas pada tanggal 24 Februari 2023 di Aula Dsipermades PPKB sebanyak 35 Orang;
- ❖ Terlaksananya Rapat Koordinasi Pelayanan KB bagi Bidang Penanggungjawab Program KB pada tanggal 10 Mei 2023 sebanyak 20 orang;

- ❖ Terlaksananya Rakor Pelayanan KB bagi Fasilitas Kesehatan (Faskes) / Puskesmaspada tanggal 8 Februari 2023 sebanyak 36 Faskes.

f) Sub Kegiatan Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran, dengan output Jumlah orang yang mengikuti promosi dan konseling KB pasca persalinan dan pasca keguguran sebanyak 12.573 orang.

Didukung kegiatan sebagai berikut :

- ❖ Terlaksananya Rapat Evaluasi Pelayanan KB Tahun 2023 bagi Bidan Puskesmas pada tanggal 24 Februari 2023 di Aula Dsipermades PPKB sebanyak 35 Orang;
- ❖ Jumlah leaflet Promosi dan Konseling Pasca Persalinan dan Keguguran sebanyak 250 leaflet (BAST 12 Juni 2023).;
- ❖ Jumlah Bidan yang mengikuti Workshop Teknik KIE KBPP angkatan I pada tanggal 24 Mei 2022 di Gedung PKK Kab. Banjarnegara sebanyak 42 Orang;
- ❖ Jumlah Bidan yang mengikuti Workshop Teknik KIE KBPP angkatan II pada tanggal 29 Mei 2022 di Gedung PKK Kab. Banjarnegara sebanyak 42 Orang.

4) Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB, dengan realisasi indikator kegiatan yaitu Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB sebanyak 5 Organisasi.

a) Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB, dengan output Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB sebanyak 3 Kampung KB.

Dengan rincian sebagai berikut :

1) Desa Karangkemiri Kecamatan Wanadadi pada tanggal 07 Juni 2023 (23 orang);
2) Desa Slatri Kecamatan Karangkobar pada tanggal 08 Juni 2023 (23 orang);
3) Desa Bandingan Kecamatan Rakit pada tanggal 14 Juni 2023 (22 orang).

b) Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB, dengan output Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB sebanyak 54 Kampung KB (864 kali).

2. Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)

Age Specific Fertility Rate (ASFR) perempuan usia 15-19 merupakan Angka kelahiran pada kelompok umur 15-19 tahun per 1000 wanita dalam satu tahun tertentu. Angka ini dapat digunakan untuk memetakan fertilitas umur muda yang dapat menjadi peringatan dini terhadap ancaman tingginya fertilitas secara umum. Fertilitas pada usia muda akan mempengaruhi potensi melahirkan sampai dengan masa reproduksinya berakhir. Jika di usia muda (masa reproduksi awal) perempuan sudah hamil dan melahirkan berarti akan memiliki potensi untuk hamil dan melahirkan anak lebih banyak lagi sampai dengan akhir usia reproduksinya. Oleh karena itu, menurunkan fertilitas remaja (ASFR 15–19 tahun) akan memberikan kontribusi terhadap penurunan angka fertilitas secara umum (TFR). Realisasi Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2023 ditunjukkan sebagai berikut :

Tabel 3.26. Capaian Indikator Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)

Sasaran Strategis	Indikator		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Status Capaian
1	2		3	4	5	6	7
Terkendalinya Angka Kelahiran Total (TFR)	1.	Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Angka	22,36	11,52	148,48	Sangat Baik

Sumber Data : Pengukuran Kinerja Dispermades PPKB, 2023

Berdasarkan pengukuran kinerja tahun 2023, diperoleh ASFR Remaja (usia 15-19) dicapai sebesar 11,52 dari target 22,36 kelahiran per 1.000 wanita usia 15-19 tahun dengan capaian 148,48 persen. Hal tersebut menunjukkan upaya-upaya untuk menurunkan angka ASFR Remaja berhasil dengan sangat baik. Capaian ASFR Remaja (usia 15-19) per kecamatan sebagai berikut :

Tabel 3.27. ASFR (usia 15-19) per Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah kelahiran remaja	Jumlah wanita usia remaja (15-49 tahun)	ASFR 15-19
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Susukan	19	2.290	8,30
2.	Purwareja Klampok	13	1.610	8,08
3.	Mandiraja	16	2.621	6,11
4.	Purwanegara	21	2.672	7,86
5.	B a w a n g	15	2.128	7,05
6.	Banjarnegara	6	2.456	2,44
7.	S i g a l u h	6	1.059	5,48
8.	Madukara	15	1.511	9,93
9.	Banjarmangu	24	1.517	15,82
10.	Wanadadi	3	1.127	2,66
11.	R a k i t	9	1.748	5,15
12.	Punggelan	41	2.913	14,08
13.	Karangkobar	26	1.041	24,97
14.	Pagentan	10	1.229	8,13
15.	Pejawaran	52	1.381	37,65
16.	B a t u r	25	1.352	18,49
17.	Wanayasa	34	1.530	22,22
18.	Kalibening	37	1.441	25,68
19.	Pandanarum	4	683	5,86
20.	Pagedongan	13	1.414	9,19

Sumber Data : Pengukuran Kinerja Dispermades PPKB, 2023

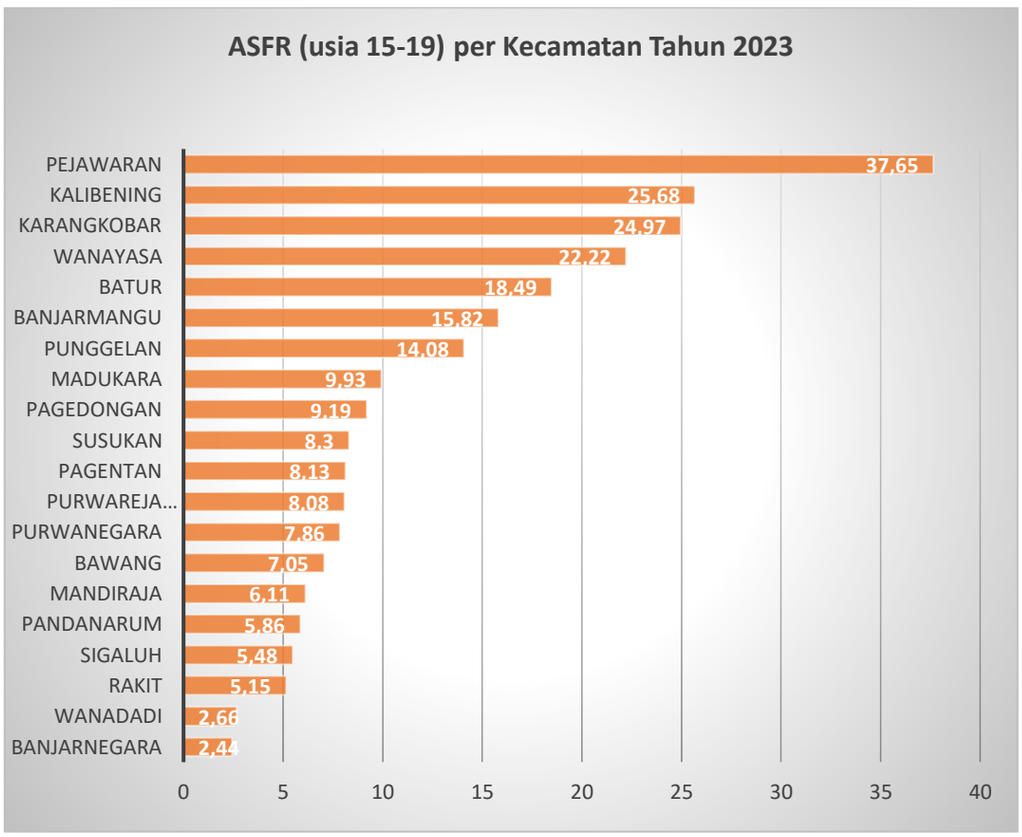

Gambar 3.6. ASFR (usia 15-19) per Kecamatan Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, ASFR remaja tertinggi sebagian besar terdapat di kecamatan wilayah atas / dataran tinggi dengan angka tertinggi pada Kecamatan Pejawaran sebesar 37,65. Angka ASFR terendah ada di Kecamatan Banjarnegara.

Tabel 3.28. Realisasi Indikator Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Tahun 2019-2023

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Terkendalinya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Angka	45,06	33,49	22,66	23,24	11,52

Sumber Data : Pengukuran Kinerja Dispermades PPKB, 2019-2023

Gambar 3.7. Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Tahun 2019-2023

Berdasarkan data di atas, capaian angka kelahiran remaja memiliki kecenderungan yang menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan tepat sasaran dan berhasil dengan sangat baik. Realisasi Indikator Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Perangkat Daerah dibandingkan Target Jangka Menengah disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.29. Realisasi Indikator Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Perangkat Daerah dibandingkan Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Renstra	Realisasi	Capaian (%)	Status Capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Terkendalinya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Nilai	21,46	11,52	146,32	Sangat Baik

Sumber Data : Pengukuran Kinerja Dispermades PPKB, 2019-2023

Berdasarkan hasil pengukuran angka kelahiran remaja dibandingkan dengan target jangka menengah maka capaian tersebut sudah memenuhi dengan capaian 146,32 persen. Hal tersebut sebagai dasar pengambilan kebijakan kependudukan khususnya remaja di tahun berikutnya.

Tabel 3.30. Realisasi Indikator Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Kabupaten dibandingkan Target Nasional dan Target Provnsi Jawa Tengah Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Nasional	Target Provinsi	Realisasi Kabupaten
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Angka	20	21	11,52

Sumber Data : Renstra BKKBN, 2020-2024

Hal-hal yang mendukung pencapaian ASFR Remaja Usia 15-19 Tahun

1. Penguatan pendidikan reproduksi remaja melalui ajang Duta GENRE. GenRe (Generasi Berencana) adalah program yang bertujuan mengedukasi dan memberikan informasi kepada remaja Indonesia agar menjadi generasi yang punya perencanaan kehidupan yang matang. Program GenRe merupakan wadah untuk mengembangkan karakter bangsa karena mengajarkan remaja untuk menjauhi Pernikahan Dini, Seks Pranikah dan Napza guna menjadi remaja tangguh dan dapat berkontribusi dalam pembangunan ;
2. Penguatan edukasi melalui PIK Remaja. PIK Remaja adalah suatu wadah kegiatan program PKBR (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja) yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi serta penyiapan kehidupan berkeluarga. Saat ini jumlah PIK remaja sudah mencapai 44 kelompok di 20 kecamatan;
3. Penguatan Pendidikan Repoduksi Remaja melalui Kegiatan Pramuka Saka Kencana melalui pembinaan dan pertemuan rutin. Pramuka Saka Kencana adalah wadah kegiatan dan pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan praktis dan bakti masyarakat, dalam bidang keluarga sejahtera dan pengembangan kependudukan. Sarana dan wahana guna memupuk, mengembangkan, membina dan mengarahkan minat dan bakat generasi muda dalam mempersiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja (PKBR).

Tantangan pencapaian ASFR Remaja Usia 15-19 Tahun

1. Masa remaja adalah masa yang paling rentan terhadap pengaruh yang terjadi di lingkungannya. Pengaruh tersebut akan dengan sangat cepat mempengaruhi remaja, apalagi disertai dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat. Sehingga memerlukan pendampingan terutama terhadap hal-hal yang berpengaruh negatif;
2. Belum optimalnya sinergitas implementasi antar program dan kegiatan tentang Remaja yang di kembangkan bersama antar perangkat daerah;
3. Luasnya jangkauan pembinaan dibandingkan dengan jumlah tenaga di lini lapangan sehingga belum optimalnya terhadap pembinaan ketahanan remaja terutama remaja putus sekolah serta remaja disabilitas.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya :

Pencapaian sasaran strategis ke 2 didukung oleh sumberdaya manusia dan anggaran. Sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan program sebanyak 14 orang terdiri dari Golongan IV (4 orang), Golongan III (S1 : 4 orang, SLTA : 1 Orang), Golongan II (orang) serta dibantu oleh 2 Orang PPPK, 1 orang PTT dan 2 orang THL. Keseluruhan potensi sumber daya manusia tersebut tersebar pada dua bidang dan masing-masing telah melaksanakan tugas dengan optimal. Selain itu dalam pelaksanaan penggerakan dan pelayanan KB di lapangan, Dispermades PPKB didukung oleh petugas Penyuluh KB sebanyak 34 orang yang tersebar di 20 kecamatan se-Kab. Banjarnegara.

Selain aparat kabupaten dan penyuluh KB pelaksanaan Program KB juga dibantu oleh 278 orang Pembantu KB Desa (PPKBD), 1.343 orang Sub PPKBD (Tingkat RW) dan 513 Kelompok KB (Tingkat RT) dan keseluruhan pelaksana tersebut merupakan potensi sumberdaya dan telah melaksanakan tugas dengan optimal dilihat dari tercapainya target kinerja. Tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.31. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Sasaran Strategis Ke-3, Indikator ASFR Remaja Usia 15-19 Tahun

Sasaran Strategis/ Indikator	Indikator			Anggaran (Rp)			Tingkat Efisiensi
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	%
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***
Sasaran : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat **Indikator :** Angka Kelahiran	22,36	11,52	148,48	5.480.540.000	5.344.655.200	97,57	2,48

Sasaran Strategis/ Indikator	Indikator			Anggaran (Rp)			Tingkat Efisiensi
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)							

Sumber Data : Pengukuran Kinerja Dispermades PPKB Tahun 2023

Berdasarkan data di atas, penggunaan sumberdaya sudah efisien karena persentase penggunaan anggaran lebih sedikit dari capaian kinerja. Capaian kinerja sebesar 148,48 persen, sedangkan persentase realisasi anggaran sebesar 97,57 sehingga penggunaan sumberdaya sudah efisien. Anggaran sebagaimana tersebut didukung oleh satu program yaitu Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga. Capaian indikator program dan kegiatan yang mendukung sebagai berikut :

Tabel 3.32. Capaian Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan Sasaran Strategis Ke-3

No	Program	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
A.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	75,99	86,59	113,94
		Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	61,5	82,17	133,61
		Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	36,7	84,10	229,16
		Cakupan PUS Peserta KB anggota Usaha Penongkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri	%	50,72	88,92	175,32
		Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	10	25,12	251,20

Sumber Data : Pengukuran Kinerja Dispermades PPKB Tahun 2023

Capaian realisasi kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung sasaran ke 3 sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga

   Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dengan indikator capaian kegiatan sebagai berikut :

a. Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan sebanyak 85 Kelompok
b. Jumlah pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan sebanyak 23.790 Orang
c. Jumlah pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan sebanyak 7 Kelompok

Capaian output sub kegiatan yang mendukung Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagai berikut :

1) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS), dengan output Jumlah unit sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) sebanyak 30 Unit oleh CV. Bima Peraga Nusantara (BAST tangggal 03 Agustus 2023);
2) Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS), dengan output Jumlah laporan hasil orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) sebanyak 3 Laporan (BKB, BKR dan BKL) dari 20 kecamatan, dengan rincian sebagai berikut ;
   - Tanggal 10 Juli 2023 (Banjarnegara, Pegedongan, Bawang, Sigaluh, Madukara);
   - Tanggal 12 Juli 2023 (Pandanarum, Kalibening, Wanayasa, Karangkobar);
   - Tanggal 13 Juli 2023 (Batur, Pejawaran, Pagentan);
   - Tanggal 14 Juli 2023 (Punggelan, Rakit, Wanadadi, Banjarmangu);
   - Tanggal 20 Juli 2023 (Susukan, Purwareja Klampok, Mandiraja, Purwanegara).
3) Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS), dengan output Jumlah

kader yang mengkuti orientasi.pelatihan teknis pelaksana/kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) sebanyak 24 Orang dengan rincian sebagai berikut :

a) Kelas Materi pada tanggal 08 Juni 2023 di Aula Dispermades PPKB (semua peserta);
b) Kelas Materi dan Kelas Praktek tanggal 12-13 Juni 2023 (Kec. Susukan), 15-16 Juni 2023 (Kec. Wanadadi) dan 19-20 Juni 2023 (Kec. Banjarmangu).

4) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS), dengan output Jumlah kader pengelola dan pelaksana (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) sebanyak 2352 Orang (784 TPK) @ 10 kali.
5) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS), dengan output Jumlah kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) sebanyak 4 Kelompok (Kec. Pagedongan, Banjarnegara, Rakit dan Wanadadi) masing-masing untuk 8 kali fasilitasi.
6) Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS), dengan output Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) sebanyak 3 laporan. Dengan rincian sebagai berikut :

- Hasil Lomba PIK Remaja Juara 1 - SMK N 2 Bawang, Juara II - MAN 2 Banjarnegara, Juara 3 - MAN 1 Banjarnegara (BA : 16 April 2023);
- Orientasi PIK Remaja tanggal 16 Mei 2023 di Aula Dispermades PPKB;

- ❖ Orientasi PIK Remaja bagi PIK-R MAN 1 Banjarnegara, MAN 2 Banjarnegara, SMK Darunnajah, SMKN 1 Bawang dan SMKN 2 Bawang tanggal 19 Juni 2023 di Aula Dispermades PPKB;
- ❖ Orientasi PIK Remaja bagi/di MTs Al-Fatah Banjarnegara pada tanggal 19 September 2023 (15 calon anggota PIK).

7) Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga, dengan output Jumlah laporan hasil promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (Menjadi orang tua hebat, generasi berencana, kelanjutusiaan serta pengelolaan keuangan keluarga) sebanyak 1 laporan yaitu Duta Genre dengan rincian sebagai berikut :

Berdasarkan Berita Acara Pemenang Lomba Duta GENRE pada tanggal 30 Januari 2023.

- ❖ Juara Putra : 1. Bagas Permana (Punggelan), 2. Fegi Lutfiantoro (Susukan), 3. Galih Panca Utama (Pandanarum);
- ❖ Juara Putri : 1. Syaifa Asri Pratiwi (Pagentan), 2. Qonita Nailun Najah (Pagedongan), 3. Afifah AHmad (Banjarmangu).

Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat

Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat merupakan salah satu sasaran utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Sasaran ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu nilai survey kepuasan masyarakat. Survey Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik..

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing- masing.

Berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, survei dapat dilakukan secara tetap dengan jangka waktu (periode) tertentu. Survei dapat dilakukan setiap 3 bulanan (triwulan), 6 bulanan (Semester) atau 1 (satu) tahun. Penyelenggara pelayanan publik setidaknya minimal melakukan survei 1 (satu) tahun sekali.

Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan secara mandiri oleh Dispermades PPKB dengan membentuk Tim yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas. Sasaran survey Dispermades PPKB diantaranya pelayanan, yaitu pada masyarakat penerima layanan diantaranya fasilitasi Dana Desa, pelayanan fasilitasi bantuan keuangan kepada desa, penyelenggaran pemerintahan desa, fasilitasi pengembangan ekonomi pedesaan serta koordinasi/konsultasi pelayanan Keluarga Berencana. Melalui survey tersebut diharapkan akan mendorong partisipasi masyarakat pengguna layanan dalam pemberikan penilaian kinerja layanan serta mendorong Dispermades PPKB untuk terus meningkatkan layanan.

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan sebagai berikut :

Tabel 3.33. Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

No	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	***2***	***3***	***4***	***5***
1.	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	TIDAK BAIK
2.	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	KURANG BAIK
3.	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	BAIK
4.	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	SANGAT BAIK

Sumber : Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2017

Kuesioner terdiri atas 9 (sembilan) pertanyaan sesuai sesuai dengan jumlah unsut pengukuran kepuasan masyarakat. Capaian realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.34. Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Status Capaian
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
Meningkatnya kualitas layanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	83	83,53	100.64	Sangat Baik

Sumber Data : Laporan Pelaksanaan SKM Dispermades PPKB Tahun 2023

Berdasarkan data di atas, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 83,53 telah mencapai target dengan kategori **Baik** serta capaian sebesar 100,64 persen. Selanjutnya Dispermades PPKB untuk terus melaksanakan peningkatan pelayanan publik agar pelayanan prima kepada Masyarakat segera terwujud. Capaian nilai masing-masing unsur ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.35. Nilai Masing-masing Unsur Pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata
1	***2***	***3***
1	Persyaratan	3,307
2	Prosedur	3,317
3	Waktu Pelayanan	3,198
4	Biaya / Tarif	3,416
5	Produk Layanan	3,317
6	Kompetensi Pelaksanaan	3,297
7	Perilaku Pelaksanaan	3,426
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,267
9	Sarana dan Prasarana	3,525

Sumber : : Laporan Pelaksanaan SKM Dispermades PPKB Tahun 2023

Keseluruh unsur tercapai penilaian yang baik, namun demikian perlu untuk melaksanakan evaluasi secara berkala guna perbaikan dan peningkatan layanan. Nilai unsur layanan terendah yaitu pada unsur waktu pelayanan, sehingga bisa menjadi prioritas evaluasi peningkatan layanan publik. Realisasi Indikator Indeks Masyarakat Tahun 2019-2023 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.36. Realisasi Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2019-2023

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***
Meningkatnya kualitas layanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	87,875	90,38	81,61	82,87	83,53

Sumber Data : Laporan Pelaksanaan KSM, , 2019-2023

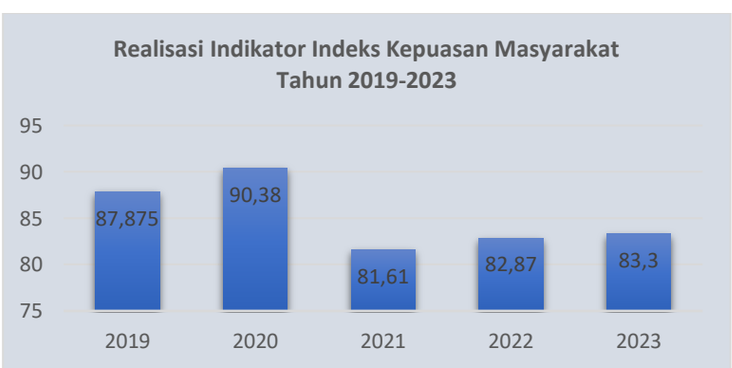

Gambar 3.8. Realisasi Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2019-2023

Berdasarkan data di atas, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tertinggi dicapai pada tahun 2020 sebesar 90,38. Kemudian terjadi penurunan yang cukup signifikan di tahun 2021 menjadi 81,61. Pada tahun 2022 dan 2023 terjadi peningkatan tetapi belum lebih baik dari tahun 2020. Hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi bagi Dispermades PPKB terhadap penurunan kualitas pelayanan untuk melakukan upaya-upaya yang serius terhadap peningkatan pelayanan kepada Masyarakat.

Capaian kinerja yang berhasil tersebut diatas karena didukung dengan :

1. Meningkatnya komitmen serta kualitas pelayanan aparatur penyelenggara Dispermades PPKB;
2. Meningatnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik penyelenggaraan urusan Dispermades PPKB sesuai dengan standar pelayanan.

Upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mempertahan dan meningkatkan capaian :

1. Evaluasi, pembinaan dan penguatan komitmen terkait pelayanan publik terhadap jajaran apatatur penyelenggara Dispermades PPKB;
2. Penyediaan, pemeliharaan dan peningkatan terhadap sarana prasarana pelayanan publik.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya :

Pencapaian sasaran strategis ke 4 didukung oleh sumberdaya manusia dan anggaran. Sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan program sebanyak 14 orang terdiri dari Golongan IV (2 orang), Golongan III (S1 : 3 orang), Golongan II (4 orang) serta dibantu oleh 1 Orang PPPK dan 4 orang THL. Keseluruhan potensi sumber daya manusia tersebut tersebar pada dua bidang dan masing-masing telah melaksanakan tugas dengan optimal.

Tabel 3.37. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Sasaran Strategis Ke-4, Indikator Indeks Kepuasan masyarakat

Sasaran Strategis/ Indikator	Indikator			Anggaran (Rp)			Tingkat Efisiensi
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Sasaran : Meningkatnya kualitas layanan publik **Indikator :** Indeks Kepuasan Masyarakat	83	83,3	100.36	6.037.690.866	5.914.389.610	97,96	2,04

Sumber Data : Pengukuran Kinerja Dispermades PPKB Tahun 2023

Berdasarkan data di atas, penggunaan sumberdaya sudah efisien karena persentase penggunaan anggaran lebih sedikit dari capaian kunerja. Capaian kinerja sebesar 100,64 persen, Sedangkan persentase realisasi anggaran sebesar 97,96 sehingga penggunaan sumberdaya sudah efisien dengan efisiensi sebesar 2,04. Anggaran sebagaimana tersebut didukung oleh satu program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten. Capaian indikator program dan kegiatan yang mendukung sebagai berikut :

Tabel 3.38. Capaian Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan Sasaran Strategis Ke-4

No	Program	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
A.	Program Penunjang usutan Pemerintah Daerah Kabupaten	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerrah yang dipenuhi	Persen	100,00	100,00	100,00

Sumber Data : Pengukuran Kinerja Dispermades PPKB Tahun 2023

Capaian realisasi kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung sasaran ke 4 sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan realisasi kinerja kegiatan Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah sebanyak 100 persen.
   1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan output Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 28 orang (12 bulan).
   2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan output Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD sebanyak 12 dokumen (Januari s.d Desember 2023).
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan realisasi kinerja kegiatan Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah sebanyak 100 persen.
   1. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan output Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan sebanyak 12 Paket (Januari s.d Desember 2023).
   2. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan output Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan sebanyak 12 Paket (Januari s.d Desember 2023).

c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan realisasi kinerja kegiatan, Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipenuhi sebanyak 100 persen.
   1. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan output Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan sebanyak 18 Unit (8 unit Laptop, 5 unit printer, 1 unit televisi, 2 kursi 1 unit kursi eselon II, 1 unit LCD,).

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan realisasi kinerja kegiatan, Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sebanyak 100 persen.
   1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan output Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan sebanyak 12 laporan (Januari s.d Desember 2023).
   2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan output Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan sebanyak 12 laporan (Januari s.d Desember 2023).

e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan realisasi kinerja kegiatan Persentase BMD penunjang urusan pemerintaan daerah yang dipelihara sebanyak 100 persen.
   1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan output Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya sebanyak 12 unit.
   2. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan output Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi sebanyak 7 unit.
   3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan output Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi sebanyak 22 unit.

B. REALISASI ANGGARAN

Dukungan anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023 adalah sebesar Rp28.530.509.895,00. Kemudian anggaran Dispermades PPKB mengalami tiga kali perubahan. Perubahan pertama yaitu dengan mulai berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/pmk.07/Tahun 2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Indikator Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunannnya Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA P) tanggal 20 Februari 2023, anggaran menurun menjadi Rp25.604.291.551,00 atau turun sebesar Rp2.926.218.344,00. Perubahan kedua yaitu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan tanggal 25 September 2023, anggaran Dispermades PPKB menjadi Rp24.591.118.266,00. Perubahan ketiga yaitu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA P) tanggal 21 Desember 2023 dengan anggaran sebesar Rp24.878.171.906,00.

Anggaran Tahun 2023 lebih tinggi dibanding tahun 2022 sebesar Rp22.523.948.490,00. Kenaikan anggaran tersebut juga didukung oleh kenaikan anggaran yang bersumber dari DAK Sub Bidang KB dari Rp11.831.982.400,00 menjadi Rp12.013.537.000.

Berdasarkan sumber dana, anggaran Dispermades PPKB TA 2023 terdiri dari APBD Kabupaten dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang KB. Anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten sebesar Rp12.864.634.906,00 dan DAK Sub Bidang KB sebesar Rp12.013.537.000. Anggaran Sub Bidang KB terbagi menjadi 1).DAK Non Fisik (BOKB) sebesar Rp10.955.336.000,00, 2).DAK Fisik Penugasan sebesar Rp1.058.201.000,00.

Adapun realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp23.501.345.543,00 yang terdiri dari APBD Kabupaten sebesar Rp12.360.956.424,00, DAK Non Fisik sebesar Rp10.096.749.767,00, DAK Fisik Penugasan sebesar Rp1.043.639.532,00.

Pengukuran penyerapan Anggaran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan alokasi anggaran (pagu dalam DPA terakhir). Pengukuran Penyerapan Anggaran dengan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{RA}{AA} \text{ x } 100\%$$

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021

Keterangan :

P : Penyerapan Anggaran

RA : Realisasi Anggaran

AA : Alokasi Anggaran

Penyerapan Anggaran Dispermades PPKB Tahun 2023 sebagai berikut :

$$P = \frac{23.501.345.543}{24.878.171.906} \text{ x } 100\%$$

$$P = 94{,}47\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, penyerapan anggaran Dispermades PPKB sebesar 94,47 persen. Penyerapan tersebut menurun dibanding tahun sebelumnya yaitu 94,90 persen. Secara rinci alokasi anggaran dan realisasi per program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.39. Rincian Program dan Kegiatan, Pagu serta Realisasi Penyerapan Anggaran Dispermades PPKB Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realiasasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
A.	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**6.349.744.506,00**	**5.939.333.210,00**	**93,54**
1.	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**25.000.000,00**	**24.943.600,00**	**99,77**
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000,00	14.997.500,00	99,98
	2. Koordinasi dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00	9.946.100,00	99,46
2.	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.436.542.726,00**	**4.094.951.932,00**	**92,30**
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.334.152.726,00	3.992.517.932,00	99,12
	2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SPKD	102.390.000,00	102.380.000,00	99,99
3.	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**548.869.700,00**	**543.011.040,00**	**98,93**
	1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	14.988.600,00	99,92
	2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	533.869.500,00	528.022.440,00	98,90
4.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**152.900.000,00**	**151.319.000,00**	**98,97**
	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	152.900.000,00	151.319.000,00	98,97
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**927.933.080,00**	**869.090.386,00**	**93,66**
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000,00	54.611.186,00	91,02
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	867.933.080,00	814.479.200,00	93,84
5.	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**258.499.600,00**	**256.017.252,00**	**99,04**
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Peeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	145.000.000,00	143.881.952.00	99,23
	2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dn Bangunan Lainnya	87.999.000,00	86.780.300,00	98,62

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realiasasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.500.000,00	25.355.000,00	99,43
B.	**Program Penataan Desa**	**103.827.000,00**	**88.474.300,00**	**85,21**
6.	**Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa**	**103.827.000,00**	**88.474.300,00**	**85,21**
	1. Fasilitasi Sarana Prasarana Desa	103.827.000,00	88.474.300,00	85,21
C.	**Program Peningkatan Kerjasama Desa**	**33.000.000,00**	**31.108.900,00**	**94,27**
	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	**33.000.000,00**	**31.108.900,00**	**94,27**
	1. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	33.000.000,00	31.108.900,00	94,27
D.	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**4.712.040.000,00**	**4.665.599.264**	**99,01**
7.	**Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**4.712.040.000,00**	**4.665.599.264**	**97,94**
	1. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	5.000.000,00	4.075.400,00	81,51
	2. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	20.000.000,00	19.323.000,00	96,62
	3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	3.450.000.000,00	3.411.754.200,00	98,89
	4. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	350.000.000,00	349.716.400,00	99,92
	5. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	159.040.000,00	158.830.900,00	99,87
	6. Fasilitasi Pengangkatan dan Peberhentian Perangkat Desa	45.000.000,00	44.012.800,00	97,81
	7. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	5.000.000,00	4.913.000,00	98,26
	8. Pembinaan Peningkata Kapasitas Anggota BPD	70.000.000,00	67.628.700,00	96,61
	9. Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	120.000.000,00	117.565.100,00	97,97
	10. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	488.000.000,00	487.779.900,00	99,95
E.	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**	**1.316.355.000,00**	**1.305.203.150,00**	**99,15**
8.	**Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**1.316.355.000,00**	**1.305.203.150,00**	**99,15**
	1. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RT, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	103.500.000,00	101.936.450,00	98,49
	2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaam Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,	936.000.000,00	930.612.100,00	99,42

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realiasasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
	Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			
	3. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	25.000.000,00	24.546.000,00	98,18
	4. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Teknologi Tepat Guna	35.000.000,00	34.000.000,00	97,14
	5. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	216.855.000,00	214.108.600,00	98,73
F.	**Program Pengendalian Penduduk**	**419.800.000,00**	**399.885.467,00**	**95,26**
9.	**Kegiatan Pemaduan dan Sinkornisasi Kebijaka Pemrintahan Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**5.000.000,00**	**4.985.000,00**	**99,70**
	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	5.000.000,00	4.985.000,00	99,70
10.	**Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**414.800.000,00**	**394.900.467,00**	**95,20**
	1. Perumusan Parameter Kependudukan	5.000.000,00	4.890.000,00	97,80
	2. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	88.200.000,00	86.926.010,00	98,56
	3. Sub Kegiatan Pencatatan dan pengumpulan Data Keluarga	225.600.000,00	219.525.000,00	97,31
	4. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	96.000.000	83.559.457,00	87,04
G.	**Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**	**6.462.865.400,00**	**5.727.086.052,00**	**88,62**
11.	**Kegiatan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**1.191.375.000,00**	**1.168.449.350,00**	**98,08**
	1. Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	120.000.000,00	114.651.000,00	95,54
	2. Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	200.375.000,00	197.977.000,00	98,80
	3. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	260.000.000,00	256.379.900,00	98,61
	4. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KB	531.000.000,00	523.589.600,00	98,60
	5. Pengendalian Program KKBPK	80.000.000,00	75.851.250,00	94,81
12.	**Kegiatan Pendayagunaan Teaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**913.000.000,00**	**893.376.000,00**	**97,85**
	1. Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	342.000.000,00	324.900.000,00	95,00

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realiasasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
	2. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	571.000.000,00	568.476.000,00	99,56
13.	**Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Keutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**3.512.490.400,00**	**2.830.538.752,00**	**80,58**
	1. Pengendalian Pendistribusian Aat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	47.700.000,00	45.579.200,00	95,55
	2. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangk panjang (MKJP)	2.310.889.400,00	1.655.473.200,00	72,07
	3. Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan KB	24.000.000,00	13.645.900,00	56,86
	4. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.058.210.000,00	1.043.639.352,00	98,62
	5. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Keshatan reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	51.700.000,00	46.210.500,00	89,38
	6. Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	20.000.000,00	15.999.600,00	80,00
14.	**Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daserah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**846.000.000,00**	**834.721.950,00**	**98,67**
	1. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	9.000.000,00	8.605.800,00	95,62
	2. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	837.000.000	826.116.150	98,70
H.	**Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**	**5.480.540.000,00**	**5.344.655.200,00**	**97,52**
15.	**Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**5.480.540.000,00**	**5.344.655.200,00**	**97,52**
	1. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	360.000.000,00	349.260.000,00	97,02
	2. Orientasi dan pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluraga/UPPKS)	50.000.000,00	49.648.400,00	99,30
	3. Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	30.000.000,00	29.945.500,00	99,82

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realiasasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
	4. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4.939.200.000,00	4.828.840.000,00	97,77
	5. Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	38.400.000,00	27.360.000,00	71,25
	6. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	25.000.000,00	23.288.300,00	93,15
	7. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	37.940.000,00	36.313.000,00	95,71
	Jumlah	**24.878.171.906,00**	**23.501.345.543,00**	**94,47**

Sumber : Pengukuran Kinerja Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara, 2023

Secara umum pengelolaan anggaran Tahun 2023 telah terlaksana dengan baik. Pada tahun 2023, dari Pagu Anggaran Rp24.878.171.906,00 realisasi belanja sebesar Rp23.501.345.543,00 atau (94,47%), sehingga terdapat efisensi belanja sebesar Rp1.376.827.363,00 (5,53%) dengan rincian sebagai berikut :

1. Sisa belanja anggaran APBD II sebesar Rp503.678.662,00. Sebagian besar karena sisa anggaran gaji ASN sebesar Rp 341.580.794,00;
2. Sisa belanja pengadaan DAK Sub Bidang KB sebesar Rp873.147.701,00. Sebagian besar sisanya merupakan sisa anggaran pada menu operasional pelayanan KB khususnya pelayanan KB MKJP sebesar Rp641.836.700,00. Sisa anggaran pada pelayanan KB MKJP karena dari 7.828 akseptor yang dianggarkan hanya terserap 5.207 akseptor.

Selain penyerapan anggaran, pengukuran lainnya yaitu terhadap konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan. Tingkat konsistensi penyerapan anggaran dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan setiap bulan. Sedangkan konsistensi pada suatu bulan merupakan rata-rata tingkat konsistensi per bulan dari Januari sampai dengan bulan tertentu. Tabel penghitungan konsistensi penyerapan anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.40. Rekapitulasi Penghitungan Konsistensi Penyerapan Anggaran Dispermades PPKBTahun 2023

No	Bulan	Rencana Penarikan Dana (RPD) (Rp)	Realisasi Anggaran (RA) (Rp)	RPD Kumulatif (Rp)	RA Kumulatif (Rp)	Tingkat Konsistensi per bulan (%)	Rata-rata Konsistensi pada bulan … (%)
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***
1.	Januari	1.241.018.011	-	1.241.018.011	-	-	-
2.	Februari	2.844.441.105	1.610.096.734	4.085.459.116	1.610.096.734	39,41	19,71
3.	Maret	3.216.659.122	2.477.898.829	7.302.118.238	4.087.995.563	55,98	31,80
4.	April	2.741.427.958	2.602.011.633	10.043.546.196	6.690.007.196	66,61	40,50
5.	Mei	4.059.168.084	1.473.672.787	14.102.714.280	8.163.679.983	57,89	43,98
6.	Juni	2.750.526.858	1.671.418.992	16.853.241.138	9.835.098.975	58,36	46,37
7.	Juli	1.674.603.358	2.765.179.908	18.527.844.496	12.600.278.883	68,01	49,47
8.	Agustus	3.011.874.258	1.583.140.482	21.539.718.754	14.183.419.365	65,85	51,51
9.	September	297.207.256	1.528.122.212	21.836.926.010	15.711.541.577	71,95	53,78
10.	Oktober	1.589.646.800	3.032.498.625	23.426.572.810	18.744.040.202	80,01	56,41
11.	November	1.004.566.953	2.931.646.548	24.431.139.763	21.675.686.750	88,72	59,34
12.	Desember	447.032.143	1.825.658.793	24.878.171.906	23.501.345.543	94,47	62,27

Sumber : Pengukuran Kinerja Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara, 2023

Berdasarkan perhitungan di atas, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan bulan Desember sebesar 62,27 persen. Angka konsistensi tersebut sedikit meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 60,65. Berdasarkan Tingkat konsistensi penyerapan anggaran tersebut, perencanaan penyerapan anggaran masih belum konsisten dibandingkan jadwal realisasi anggaran atau penyerapan anggaran banyak yang tertunda. Perkembangan Pagu Anggaran /Alokasi Anggaran dengan Realisasi Anggaran Tahun 2019-2023 ditunjukkan pada gambar sebagai berikut :

Tabel 3.41. Perkembangan Pagu Anggaran dengan Realisasi Anggaran Tahun 2019-2023

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisai (Rp)	Status Capaian
1	***2***	***3***	***4***	***5***
1.	2019	11.147.189.500	9.378.802.101	84,14
2.	2020	12.777.539.747	11.584.452.228	90,66
3.	2021	18.230.368.900	16.826.252.606	92,30
4.	2022	22.523.948.490	21.375.703.760	94,90
5.	2023	24.878.171.906	23.501.345.543	94,47

Sumber Data : Pengukuran Kinerja Dispermades PPKB Tahun 2023

Gambar 3.9. Perbandingan Penyerapan Anggaran Tahun 2019 - 2023

Berdasarkan gambar di atas, alokasi anggaran Dispermades PPKB semakin meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan yang cukup besar pada tahun 2021 dimana terdapat penambahan anggaran untuk pembayaran Sosial Jaminan Kesehatan untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sebelumnya anggaran tersebut melekat pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kab. Banjarnegara. Serta meningkatnya alokasi anggaran DAK Sub Bidang KB dari tahun sebelumnya sehingga memiliki kontribusi dalam peningkatan anggaran.

Beberapa permasalahan penyerapan anggaran Tahun 2023 diantaranya sebagai berikut :

1. Beberapa anggaran, penyerapannya tergantung pada kondisi lapangan terutama fasilitasi pelayanan KB beserta pendukungnya. Diantaranya menu Pelayanan KB MKJP tersedia alokasi pelayanan untuk 7.828 akseptor, sedangkannya realisasi hanya 5.207;
2. Proses penetapan anggaran perubahan agak terlambat. Pada tahun 2023, anggaran perubahan bisa dilaksanakan pada akhir bulan Oktober 2023, sehingga kegiatan hanya memiliki waktu efektif pelaksanaan bulan November. Hal tersebut juga berkaitan dengan pencairan GU nihil pada akhir bulan November 2023. Dan agar seluruh kegiatan perubahan bisa dilaksanakan maka, kegiatan harus dilaksanakan dengan cepat;
3. Rencana anggaran kas yang telah disusun tidak dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan, sehingga terdapat gab antara rencana dan realisasi anggaran. Pelaksana teknis sering kali melewati jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah disusun yang berdampak pada tertundanya penyerapan anggaran;
4. Beberapa kegiatan merupakan sinkronisasi dengan kegiatan/kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga pelaksanaannya menunggu instruksi/kebijakan dari Provinsi. Pada sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, pada anggaran perubahan dialihkan untuk mendukung sub kegiatan yang lain karena di Tingkat Provinsi Jawa Tengah tidak dilaksanakan Bulan Bhakti Gotong Royong yang sedianya dilaksanakan serentak seluruh Kabupaten se-Provinsi Jawa Tengah.

Beberapa upaya Dispermades PPKB dalam mengefektifkan penggunaan anggaran diantaranya :

1. Melaksanakan pencermatan pada penyusunan rencana anggaran kas agar tidak terjadi kendala/permasalahan ketersediaan anggaran pada saat pelaksanaan;
2. Melaksanakan rapat koordinasi, monitoring serta pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan agar pelaksanaan sesuai dengan jadwa perencanaan;

3. Melaksanakan pemetaan pada pengadaan barang dan jasa terutama yang bersumber dana dari DAK Fisik agar bisa terlaksana tepat waktu. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan terkait Pelaksanaan DAK Fisik bahwa batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Tahap II yaitu pada tanggal 21 Juli tahun berjalan;
4. Melaksanaan pemetaan dan pergeseran anggaran tehadap sisa lebih anggaran sedini mungkin untuk dialokasikan pada capaian kinerja lainnya yang masih terdapat kekurangan dalam rangka optimalisasi pencapaian target kegiatan dan keuangan;
5. Monitoring dan pemetaan pencairan keuangan terutama menjelang akhir tahun untuk mengakomodir kebutuhan dan ketersediaan anggaran agar penyerapan anggaran optimal;
6. Mempercepat proses pencairan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Selain melaksanakan sasaran kinerja utama, Dispermades PPKB juga berpartisipasi aktif dalam program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran nasional. Beberapa prestasi yang diperoleh pada Tahun 2023 diantaranya :

1. Juara 1 pada lomba Pelaksana Posyandu Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 atas nama Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Tri Lestari II Desa Jenggawur Kecamatan Banjarmangu;
2. Juara 2 pada Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 atas nama Desa Madukara Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
3. Pencapaian Hasil Pelayanan KB Terbaik dalam rangka Hari Kontrasepsi Sedunia Tahun 2023;
4. Peringkat 2 atas Penilaian Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2023.
5. Terbaik 3 atas Audit Pengawasan Kearsipan Internal Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Banjarnegara.

BAB IV. PENUTUP

Laporan Kinerja Dispermades PPKB Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas amanat pelaksanan kinerja dan anggaran. Selain itu juga sebagai bahan evaluasi permasalahan, kegagalan serta faktor-faktor yang mendukung untuk perbaikan serta upaya meningkatkan kinerja. Laporan kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Tahun Anggaran 2023, ditetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran yang diukur melalui 5 (lima) indikator kinerja. Rata-rata capaian indikator sebesar 133,04 persen. Empat indikator memiliki capaian di atas 100 persen yaitu (1) Jumlah Desa berstatus mandiri, (2) Angka Kelahiran Total (TFR), (3) Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) dan (4) Indeks Kepuasan Masyarakat. Sedangkan satu indikator lainnya tercapai kurang dari 100 persen meskipun masih dalam kategori sangat tinggi yaitu indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara ini disusun. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan memberikan informasi yang jelas kepada seluruh pihak yang membutuhkan. Saran dan masukan dari berbagai pihak semoga bisa menjadi perbaikan kinerja dan motivasi pada periode yang akan datang.

Banjarnegara, 31 Januari 2024

KEPALA DISPERMADES PPKB
KABUPATEN BANJARNEGARA

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DISPERMADES PPKB

HENDRO CAHYONO, SE., MSi.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681130 199703 1 007

Perjanjian Kinerja Perubahan 2023

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANJARNEGARA

Jl. S Parman No. 7 Banjarnegara Telp. (0286) 594442
email : dispermadesppkb.bna@gmail.com

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan S. Parman No. 7 Telepon (0286) 594442 Faksimile (0286) 594442
Website : dispermadesppkb.banjarnegarakab.go.id, email : dispermadesppkb.bna@banjarnegarakab.go.id
BANJARNEGARA Kode Pos 53412

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HENDRO CAHYONO, SE, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : TRI HARSO WIDIRAHMANTO, SH

Jabatan : Pj. BUPATI BANJARNEGARA

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kegiatan yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarnegara, 2 Oktober 2023

Pihak Kedua	Pihak Pertama
PJ. BUPATI BANJARNEGARA	**KEPALA DINAS**
TRI HARSO WIDIRAHMANTO, SH	**HENDRO CAHYONO, SE, M.Si** Pembina Utama Muda NIP. 19681130 199703 1 007

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANJARNEGARA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*		
1.	Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77	77	-
2.	Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah Desa berstatus mandiri	3 Desa	3 Desa	-
3.	Terkendalinya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,08 Angka	2,08 Angka	-
		Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	22,36 Angka	22,36 Angka	-
4.	Meningkatnya kualitas layanan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	83	83	-

No	Program	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Tambah/Kurang	Ket.
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp10.015.878.395	Rp6.062.690.866	(Rp3.953.187.529)	APBD Kab
2.	Program Penataan Desa	Rp208.827.000	Rp103.827.000	(Rp105.000.000)	APBD Kab
3.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp100.000.000	Rp33.000.000	(Rp67.000.000)	APBD Kab
4.	Program Administrasi Pemerintahan	Rp4.987.267.500	Rp4.712.040.000	(Rp275.227.500)	APBD Kab

No	Program	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Tambah/Kurang	Ket.
5.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp535.000.000	Rp1.316.355.000	Rp781.355.000	APBD Kab
6.	Program Pengendalian Penduduk	Rp479.800.000	Rp419.800.000	(Rp60.000.000)	APBD Kab dan DAK
7.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp6.621.137.000	Rp6.462.865.400	(Rp158.271.600)	APBD Kab dan DAK
8.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp5.582.600.000	Rp5.480.540.000	(Rp102.060.000)	APBD Kab dan DAK
	Jumlah	**Rp28.530.509.895**	**Rp24.591.118.266**	**(Rp3.939.391.629)**	

Banjarnegara, 2 Oktober 2023

Pihak Kedua

PJ. BUPATI BANJARNEGARA

TRI HARSO WIDIRAHMANTO, SH

Pihak Pertama

KEPALA DINAS

HENDRO CAHYONO, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681130 199703 1 007

RENCANA AKSI TAHUN 2023

DIPERMADES PPKB
KABUPATEN BANJARNEGARA

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2023	TARGET KINERJA				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET KEUANGAN				PENANGGUNGJAWAB
				TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV					TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77	-	-	77	77	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	4.450.000	7.980.000	10.000.000	10.000.000	Sekretaris
										Koordinasi dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	4.480.000	9.177.600	10.000.000	10.000.000	
2	Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah Desa berstatus mandiri	3 Desa	-	-	3 Desa	3 Desa	Penataan Desa	Penyelenggaraan Penataan Desa	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	208.827.000	25.664.800	98.135.300	167.853.300	208.827.000	Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan & Tata Ruang Perdesaan
								Peningkatan Kerjasama antar Desa	Fasilitasi Kerjasama antar Desa	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	100.000.000	3.594.200	38.653.900	47.747.900	100.000.000	Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan & Tata Ruang Perdesaan
								Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	13.000.000	5.790.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Kelembagaan dan Perencanaan Partisipatif & Kepala Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna
										Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	13.000.000	5.975.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Kelembagaan dan Perencanaan Partisipatif
										Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	40.000.000	14.720.000	27.225.000	37.725.000	40.000.000	Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Kelembagaan dan Perencanaan Partisipatif
										Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	3.600.000.000	897.967.800	1.791.103.600	2.682.854.400	3.600.000.000	Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Kelembagaan dan Perencanaan Partisipatif
										Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Kelembagaan dan Perencanaan Partisipatif
										Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	110.000.000	-	110.000.000	110.000.000	110.000.000	Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Kelembagaan dan Perencanaan Partisipatif & Kepala Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
										Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Kelembagaan dan Perencanaan Partisipatif
										Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Kelembagaan dan Perencanaan Partisipatif
										Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	13.000.000	-	13.000.000	13.000.000	13.000.000	Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Kelembagaan dan Perencanaan Partisipatif

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2023	TARGET KINERJA				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET KEUANGAN				PENANGGUNGJAWAB
				TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV					TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	300.000.000	91.884.700	300.000.000	300.000.000	300.000.000	Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Kelembagaan dan Perencanaan Partisipatif
										Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	150.000.000	114.582.900	143.269.900	149.325.000	150.000.000	Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan & Tata Ruang Perdesaan
										Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	533.267.500	38.267.500	38.267.500	533.267.500	533.267.500	Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Kelembagaan dan Perencanaan Partisipatif
								Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat)	155.000.000	45.025.200	162.600.200	154.500	155.000.000	Kepala Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna & Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Kelembagaan dan Perencanaan Partisipatif
										Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat)	40.000.000	25.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	Kepala Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna & Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Kelembagaan dan Perencanaan Partisipatif
										Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	50.000.000	-	44.760.000	50.000.000	50.000.000	
										Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	50.000.000	-	10.841.000	50.000.000	50.000.000	
										Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	15.000.000	-	15.000.000	15.000.000	15.000.000	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2023	TARGET KINERJA				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET KEUANGAN				PENANGGUNGJAWAB
				TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV					TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										Fasilitasi Tim Pengerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	225.000.000	45.032.800	128.872.800	225.000.000	225.000.000	
3	Terkendalinya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,08	-	-	-	2,08	Pengendalian Penduduk	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	25.000.000	4.450.000	13.506.000	25.000.000	25.000.000	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi
									Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten.Kota	Perumusan Parameter Kependudukan	45.000.000	621.600	33.750.000	41.250.000	45.000.000	
										Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	88.200.000	13.985.000	50.140.000	62.420.000	88.200.000	
										Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	225.600.000	56.400.000	112.800.000	169.200.000	225.600.000	
										Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	96.000.000	24.000.000	48.000.000	72.000.000	96.000.000	
								Pembinaan Keluarga Berencana	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	120.000.000	-	65.250.000	87.250.000	120.000.000	Kepala Bidang Keluarga Berencana
										Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetaj dan Elektronik serta Media Luar Ruang	200.000.000	16.530.000.000	99.912.000	197.012.000	200.000.000	
										Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	260.000.000	52.000.000	130.000.000	208.000.000	260.000.000	
										Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	531.000.000	113.925.000	265.500.000	417.075.000	531.000.000	
										Pengendalian Program KKBPK	80.000.000	4.050.000	43.650.000	60.300.000	80.000.000	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2023	TARGET KINERJA				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET KEUANGAN				PENANGGUNGJAWAB
				TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV					TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Pembinaan IMP dan Program LLBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	342.000.000	68.400.000	171.000.000	273.600.000	342.000.000	
										Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	571.000.000	114.820.000	287.000.000	458.100.000	571.000.000	
									Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	47.700.000	12.125.000	25.550.000	38.375.000	47.700.000	
										Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2.398.536.000	841.975.400	1.572.449.600	2.213.906.000	2.398.536.000	
										Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	50.000.000	29.103.400	42.900.000	44.150.000	50.000.000	
										Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.058.201.000	122.801.000	1.058.201.000	1.058.201.000	1.058.201.000	
										Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	76.700.000	22.149.000	49.250.000	64.060.000	76.700.000	
										Promosi dan Konseling KB Pasca Oersalinan dan PAsca Keguguran	40.000.000	16.306.900	30.630.000	30.630.000	40.000.000	
									Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	9.000.000	-	3.040.000	9.000.000	9.000.000	
										Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	837.000.000	162.270.000	418.500.000	674.730.000	837.000.000	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2023	TARGET KINERJA				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET KEUANGAN				PENANGGUNGJAWAB
				TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV					TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15019 tahun (ASFR 15-19)	22,36	-	-	-	22,36	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahan dan Kesejahteraan Kekluarga	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan ekonomi Keluarga/UPPKS)	360.000.000	-	360.000.000	360.000.000	360.000.000	
										Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	130.000.000	34.521.300	130.000.000	130.000.000	130.000.000	
										Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	30.000.000	906.700	30.000.000	30.000.000	30.000.000	
										Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4.939.200.000	1.646.400.000	2.881.200.000	4.116.000.000	4.939.200.000	
										Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	38.400.000	4.800.000	19.200.000	33.600.000	38.400.000	
										Promosi dan Sosialisasi Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	25.000.000	10.435.200	25.000.000	25.000.000	25.000.000	
										Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	60.000.000	41.054.600	49.150.000	57.900.000	60.000.000	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2023	TARGET KINERJA				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET KEUANGAN				PENANGGUNGJAWAB
				TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV					TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	Meningkatnya kualitas layanan masyarakat	Indeks Kepuasan Msayarakat	83	-	-	83	83	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.514.019.412	1.633.850.000	3.267.700.000	4.493.070.312	5.514.019.412	Sekretaris
										Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	101.140.000	26.530.000	51.400.000	76.270.000	101.140.000	
									Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	4.760.000	9.760.000	15.610.000	20.000.000	
										Penyediaan Bahan Logistik Kantor	586.732.500	153.430.000	316.308.500	470.393.500	586.732.500	
									Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.000.000	19.300.000	38.200.000	54.100.000	70.000.000	
										Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	932.813.483	269.658.764	491.105.337	711.979.410	932.813.483	
									Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.200.000.000	859.516.500	2.188.540.000	2.194.270.000	2.200.000.000	
										Pengadaan sarana dan Parasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	261.173.000	173.737.000	261.173.000	261.173.000	261.173.000	
									Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	165.000.000	48.950.000	108.840.000	154.110.000	165.000.000	
										Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	50.004.220	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
										Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.000.000	18.250.000	39.750.000	45.000.000	45.000.000	
											28.530.509.895	**24.622.921.484**	**18.108.242.237**	**24.215.662.822**	**28.530.509.895**	

Banjarnegara, 31 Januari 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Banjarnegara

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DISPERMADES PPKB

HENDRO CAHYONO, SE, M.Si
NIP. 19681130 199703 1 007

GUBERNUR JAWA TENGAH

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 002.5/0001030

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 414/141 Tahun 2023 tanggal 28 Juni 2023
tentang Pemenang Lomba Desa Dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

Diberikan Kepada :

DESA MADUKARA
KECAMATAN MADUKARA
KABUPATEN BANJARNEGARA

Sebagai :

JUARA II

KATEGORI DESA
LOMBA DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 28 Juni 2023
Plh. GUBERNUR JAWA TENGAH

H. TAJ YASIN

Piagam Penghargaan Juara II Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 an. Desa Madukara Kec.Madukara Kab. Banjarnegara

GUBERNUR JAWA TENGAH

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 002.5/0014355

Dasar : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 449.4/95 Tahun 2023 tanggal 4 September
tentang Pemenang Lomba Pelaksana Terbaik Posyandu Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Diberikan kepada :

POS PELAYANAN TERPADU TRI LESTARI II
DESA JENGGAWUR KECAMATAN BANJARMANGGU, KABUPATEN BANJARNEGARA

Sebagai :

PEMENANG I
Kategori Kabupaten

Pelaksana Terbaik Pos Pelayanan Terpadu
Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Semarang, 4 September 2023
GUBERNUR JAWA TENGAH,

H. GANJAR PRANOWO, SH, M.IP

Piagam Penghargaan Pemenang Lomba Pelaksana Terbaik Posyandu Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 an. Posyandu Tri Lestari II Desa Jenggawur Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara

bkkbn
Jawa Tengah

PIAGAM PENGHARGAAN

diberikan kepada

Dinas Permades PPKB Kab. Banjarnegara

atas

Pencapaian Hasil Pelayanan KB Terbaik
dalam rangka Hari Kontrasepsi Sedunia Tahun 2023

Plt Deputi Bidang Keluarga Berencana
dan Kesehatan Reproduksi

Drs. Sukaryo Tegah Santoso, M.Pd

Piagam Penghargaan Pencapaian Hasil Pelayanan KB terbaik calam rangka Hari Kontrasepsi Sedunia Tahun 2023

Piagam Penghargaan Terbaik 3 pada Audit Pengawasan Kearsipan Internal Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023

Piagam Penghargaan Peringkat 2 pada Penilaian Kematangan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023

TMMD Sengkuyung I Desa Pegundungan Kecamatan Pejawaran Tahun 2023

TMMD Sengkuyung II Desa Gumelem Wetan Kecamatan Susukan Tahun 2023

TMMD Sengkuyung III Desa Ambal Kecamatan Karangkobar Tahun 2023

Kunjungan Pada kelompok BKB dan Posyandu di Desa Gelang Oleh Tim Penggerak PKK Dalam Rangka Pembinaan Wilayah Desa Binaan Tahun 2023

Kunjungan Pada kelompok BKB dan Posyandu di Desa Sigaluh Oleh Tim Penggerak PKK Dalam Rangka Pembinaan Wilayah Desa Binaan Tahun 2023

Kunjungan Tim Penggerak PKK di Kelompok BKR Desa Penawangan Kec. Madukara

Pemilihan Duta Generasi Berencana Tahun 2023

Workshop Forum Genre dan PIK Remaja Tingkat Kabupaten Banjarnegara

Pembinaan Pusat Informasi dan Konseling remaja (PIK-R) Tahun 2023

Pelayanan KB TMKK Kecamatan Rakit Tahun 2023

Pembinaan kampung KB Desa Cendana Kecamatan Banjarnegara Tahun 2023

Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Desa Pagentan Kecamatan Pagentan Tahun 2023

Stock Opname Alat dan Obat Kontrasepsi Semester II Tahun 2023

Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2023

Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023